



BADAN POM



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT UTAMA

2018

KATA PENGANTAR



Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Satuan Kerja di BPOM, Sekretariat Utama wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Sekretariat Utama wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Tahun 2018 ini adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2015 – 2019. Diharapkan Laporan Kinerja yang disajikan ini dapat menyajikan pencapaian sasaran strategis Renstra Sekretariat Utama dan dijadikan panduan untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan agar Sasaran Strategis Sekretariat Utama dapat tercapai secara optimal di akhir periode Renstra.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja BPOM di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2019

Sekretaris Utama,



Dra. Elin Herlina, Apt., MP

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
Ringkasan Eksekutif	vi
<i>Milestone</i> Sekretariat Utama Tahun 2018	viii
Bab I. Pendahuluan.....	1
Bab II. Perencanaan Kinerja.....	11
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	21
Bab IV. Penutup	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	13
Tabel 2.	Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2018.....	16
Tabel 3.	Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran.....	20
Tabel 4.	Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2018.....	21
Tabel 5.	Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2018	22
Tabel 6.	Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2018.....	24
Tabel 7.	Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2018	34
Tabel 8.	Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2018.....	35
Tabel 9.	Pencapaian Sasaran Keempat Tahun 2018.....	40
Tabel 10.	Pencapaian Sasaran Kelima Tahun 2018.....	44
Tabel 11.	Pencapaian Sasaran Keenam Tahun 2018.....	48
Tabel 12.	Pencapaian Sasaran Ketujuh Tahun 2018	51
Tabel 13.	Pencapaian Sasaran Kedelapan Tahun 2018	53
Tabel 14.	Pencapaian Sasaran Kesembilan Tahun 2018	55
Tabel 15.	Pencapaian Sasaran Kesepuluh Tahun 2018.....	57
Tabel 16.	Pencapaian Sasaran Kesebelas Tahun 2018.....	61
Tabel 17.	Pencapaian Sasaran Keduabelas Tahun 2018	65
Tabel 18.	Realisasi Keuangan Sekretariat Utama Tahun 2018 Per Program.....	68
Tabel 19.	Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Strategis Sekretariat Utama Tahun 2018.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama	4
Gambar 2. Demografi Pegawai per unit Eselon II.....	5
Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama berdasarkan Golongan	5
Gambar 4. Demografi Pegawai Sekretariat Utama berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Gambar 5. Demografi Pegawai Sekretariat Utama berdasarkan Usia.....	6
Gambar 6. Visi, Misi, dan Tujuan Sekretariat Utama	11
Gambar 7. Peta Strategi Level 1 Sekretariat Utama.....	12
Gambar 8. Kerangka Logis Evaluasi RB	25

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Utama sebagai salah satu Satuan kerja di BPOM yang memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Utama dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Untuk mencapai tujuan Sekretariat Utama 2015-2019, telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Program yaitu: 1) "Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019" tercapai dengan kategori Cukup (99,20%); 2) "Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik" tercapai dengan kategori Cukup (98,83%); 3) "Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen" tercapai dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (128,93%); 4) "Meningkatnya kepercayaan/opini positif Masyarakat terhadap BPOM" tercapai dengan kategori Memuaskan (105,24%); 5) "Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama" tercapai dengan kategori Cukup (92,24%); 6) "Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu" tercapai dengan kategori Baik (100%); 7) "Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM" tercapai dengan kategori Cukup (99,44%); 8) "Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran" tercapai dengan kategori Baik (100%); 9) "Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum" tercapai dengan kategori Baik (100%); 10) "Meningkatnya kerja sama BPOM" tercapai dengan kategori Baik (100%); 11) "Menguatnya pengelolaan hubungan Masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen" tercapai dengan kategori Memuaskan (116,60%); serta 12) "Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019" tercapai dengan kategori Cukup (94,05%).

Dari 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Sekretariat Utama, 4 (empat) Indikator Kinerja telah melampaui target di tahun 2018 dengan kategori pencapaian Memuaskan, yaitu 1) Persentase opini positif Masyarakat terhadap BPOM, dengan capaian 105,24%; 2) Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik, dengan capaian 102,38%; 3) Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM, dengan capaian 116,82%; serta 4) Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung, dengan capaian 104,57%. Kemudian 6 (enam) Indikator Kinerja telah mencapai target 100% di tahun 2018 dengan kategori pencapaian Baik, yaitu 1) Opini BPK atas laporan keuangan BPOM; 2) Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu; 3) Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi; 4) Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun; 5) Persentase advokasi hukum yang diselesaikan; serta 6) Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM. Sedangkan 4 (empat) Indikator Kinerja tidak mencapai target dengan kategori pencapaian Cukup, yaitu 1) Nilai RB BPOM komponen Penilaian diluar program penguatan pengawasan, dengan capaian 98,81%; 2) Nilai Pengelolaan BMN BPOM, dengan capaian 98,83%; 3) Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama,

dengan capaian 92,24%; 4) Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik, dengan capaian 93,56%; serta 5) Nilai AKIP Sekretariat Utama, dengan capaian 94,05%. Untuk 2 (dua) Indikator Kinerja Sekretariat Utama yaitu 1) Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen; dan 2) Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1, diperoleh capaian yang melebihi target dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan karena capaiannya lebih 125%, yaitu masing-masing sebesar 128,93% dan 128,42%.

Pada tahun 2018, pagu anggaran Sekretariat Utama sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2018 adalah Rp387.525.735.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada bulan Agustus 2018 Sekretariat Utama memperoleh tambahan anggaran dari Satuan Kerja lain untuk tambahan belanja pegawai dalam rangka memenuhi tunjangan kinerja pegawai sehingga total anggaran BPOM menjadi Rp398.836.033.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga puluh tiga ribu rupiah). Dari total anggaran, terealisasi sebesar Rp326.193.503.684,- (tiga ratus dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), 81,79% dari total pagu.

Alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung Sasaran Program “Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019” yaitu sebesar 69,77%, hal ini dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang menjalankan fungsi dukungan manajemen, karena didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan gedung dan layanan internal (*overhead*) dan pemeliharaan.

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Sekretariat Utama harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Peningkatan kemampuan SDM khususnya Pengelola BMN serta memberikan *reward* dan *punishment* terhadap Satker Pengguna BMN, serta dilakukan intensifikasi pembinaan terhadap pengelola BMN.
2. Tunjangan kinerja pegawai berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja per triwulan.
3. Dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai bahan masukan perencanaan, usulan kebutuhan SDM, maupun kaji ulang bisnis proses dan struktur organisasi.
4. Perencanaan penyusunan regulasi yang mampu mengantisipasi dinamika lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.
5. Pengembangan aplikasi *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-performance* yang terintegrasi.
6. Meningkatkan terus kegiatan KIE kepada Masyarakat melalui berbagai kegiatan baik langsung maupun melalui berbagai media.
7. Meningkatkan kecepatan layanan dalam permintaan informasi dan penanganan pengaduan Masyarakat serta menginformasikan hasil tindak lanjut yang dilakukan BPOM terhadap laporan Masyarakat.
8. Peningkatan koordinasi penyiapan bahan kunjungan kerja luar negeri dan dokumen posisi BPOM/Indonesia dalam forum bilateral, regional dan multilateral.

MILESTONE SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2018

Public Relation (PR) Indonesia Award
Tahun 2017 dan 2018



**Anugerah Keterbukaan Informasi
Badan Publik Tahun 2018**
“MENUJU INFORMATIF” dari Komite
Informasi Publik



Piala Anggakara Birawa
10 Instansi terbaik (Top 10) dalam pengelolaan
pengaduan pelayanan publik tahun 2018 dari
Kementerian PAN dan RB



**Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan
BPOM secara berturut-turut sejak tahun
2014 s.d 2018**





BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan BPOM;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan Masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Utama didukung oleh 5 (lima) Biro yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sebagai berikut:

Biro Perencanaan dan Keuangan

**T
U
G
A
S**

Melaksanakan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan
2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara
3. Penyiapan koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja
4. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

**F
U
N
G
S
I**

Biro Kerja Sama

T
U
G
A
S

Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri di bidang Pengawasan Obat dan Makanan

1. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan obat dan makanan
2. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan obat dan makanan, dan
3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

F
U
N
G
S
I

Biro Hukum dan Organisasi

T
U
G
A
S

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta rumusan perjanjian
2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan dokumentasi, analisis, dan evaluasi hukum
3. Pelaksanaan advokasi hukum
4. Penataan organisasi dan tata laksana
5. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

F
U
N
G
S
I

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

T
U
G
A
S

Melaksanakan koordinasi pengelolaan Barang Milik Negara, kerumahtangaan, perencanaan dan pengelolaan karir dan kinerja sumber daya manusia, dan urusan persuratan dan kearsipan

1. Pengelolaan Barang Milik Negara dan layanan pengadaan barang/jasa
2. Pelaksanaan urusan kerumahtangaan
3. Perencanaan dan pengelolaan karir dan sumber daya manusia
4. Pengelolaan kinerja sumber daya manusia
5. Pengelolaan persuratan dan kearsipan

F
U
N
G
S
I

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan

T
U
G
A
S

Melaksanakan pengelolaan hubungan Masyarakat, komunikasi, publikasi, pengaduan Masyarakat, koordinasi dan pemberian dukungan strategis kepada pimpinan, keprotokolan, dan urusan kesekretariatan pimpinan

F
U
N
G
S
I

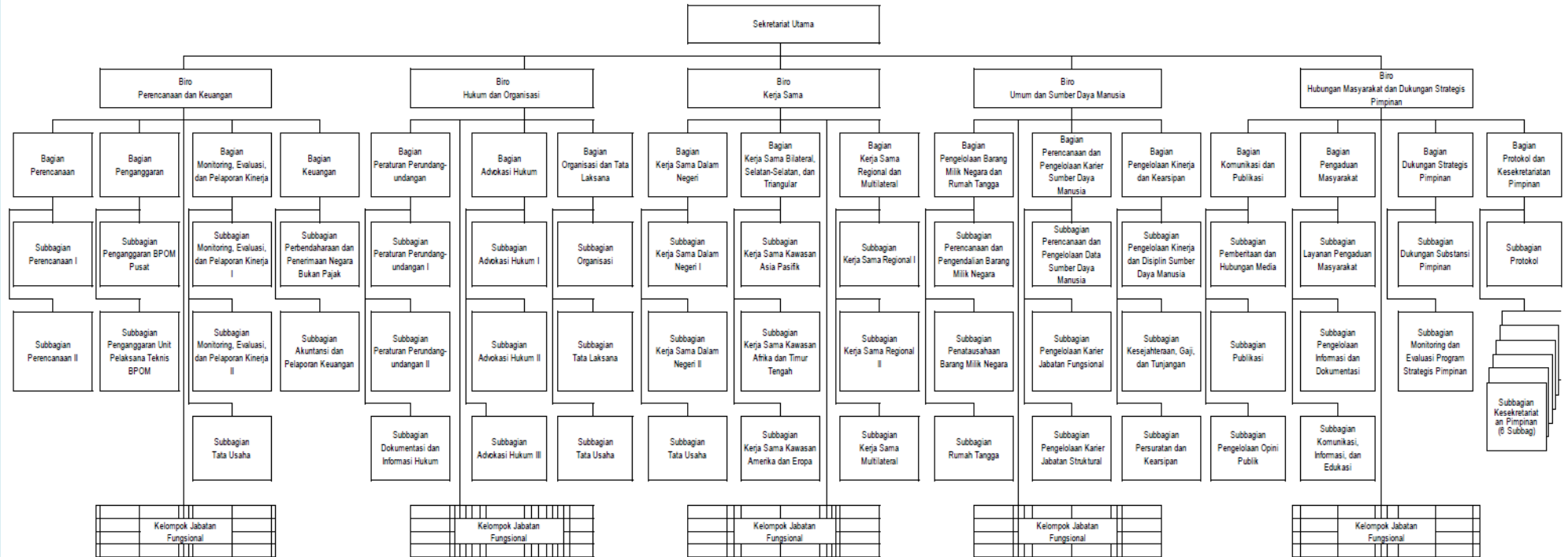
1. Pengelolaan hubungan Masyarakat, komunikasi, dan publikasi
2. Pengelolaan pengaduan Masyarakat
3. Pengelolaan informasi dan dokumentasi di bidang pengawasan obat dan makanan
4. Penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan strategis kepada pimpinan, dan
5. Pelaksanaan urusan protokol dan kesekretariatan pimpinan

Selain membawahi biro-biro, Sekretariat Utama juga membawahi unit pusat-pusat yang bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretariat Utama, antara lain:

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai/Loka POM)

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

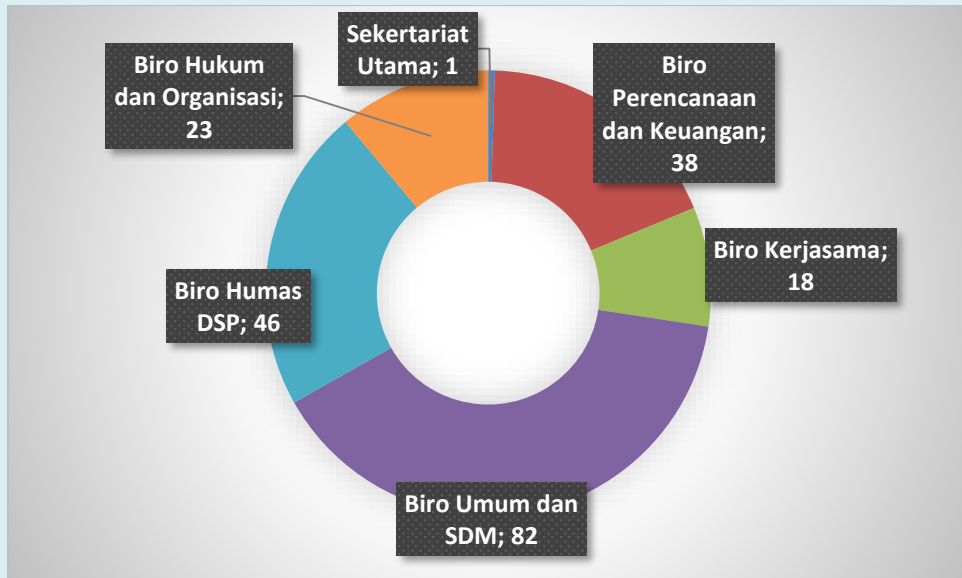
Bagan Organisasi Sekretariat Utama



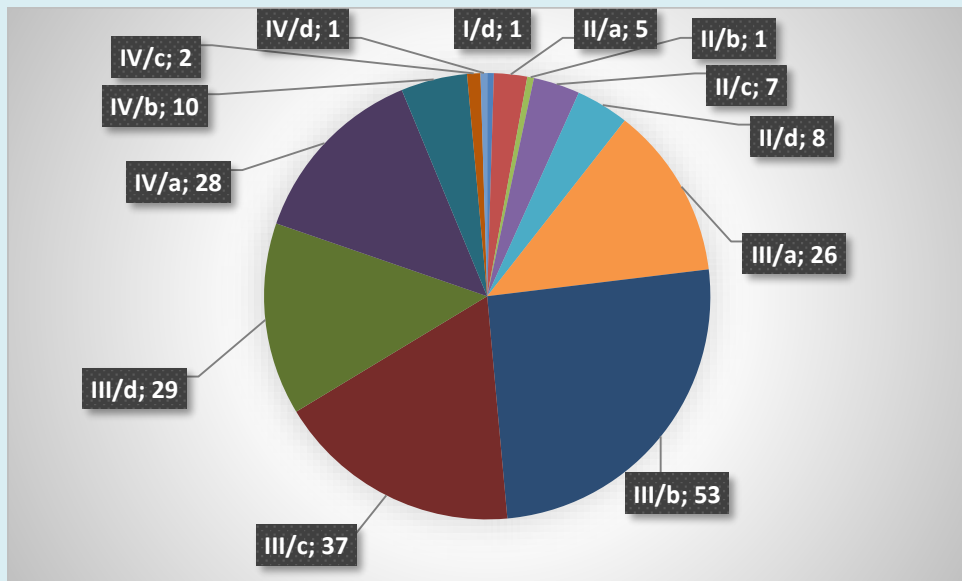
Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama

B. SUMBER DAYA MANUSIA

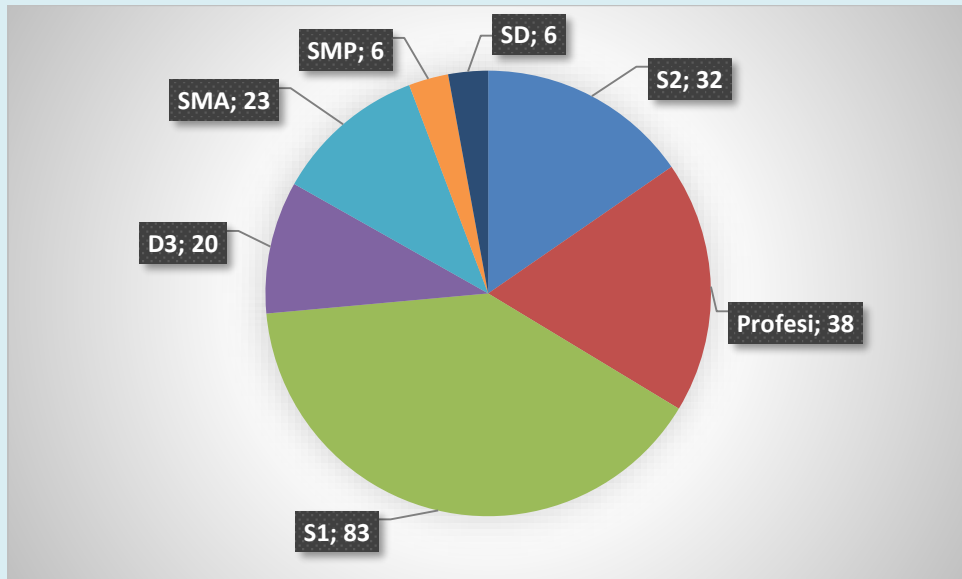
Salah satu aset yang utama dalam rangka mewujudkan visi dan misi adalah kompetensi yang tinggi dari Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Berdasarkan data kepegawaian per Februari 2019, terdapat total 208 pegawai yang aktif bekerja.



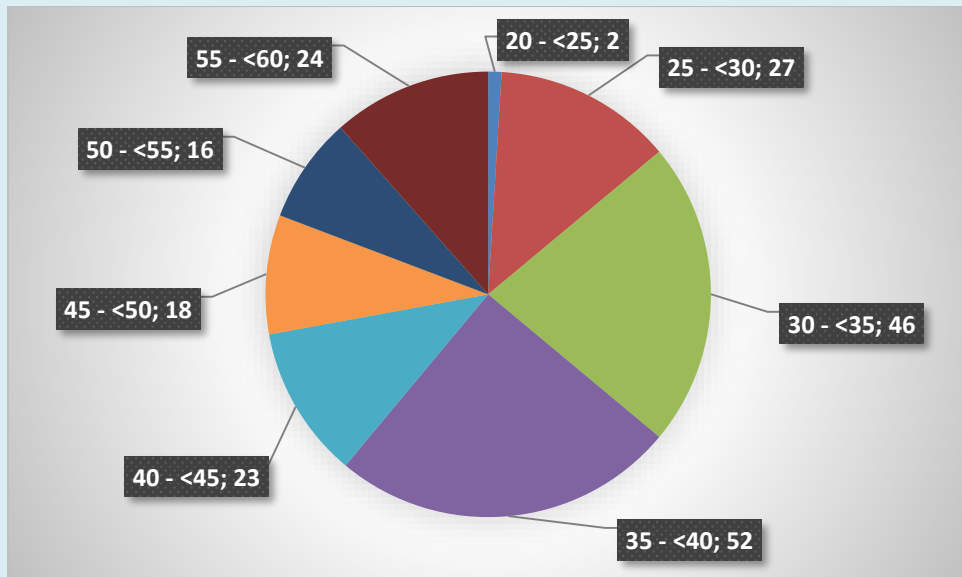
Gambar 2. Demografi Pegawai Per unit Eselon II



Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Golongan



Gambar 4. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 5. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Usia

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Sekretariat Utama yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan *Human Capital Management*.

BPOM memiliki SDM dengan kompetensi dan variasi latar belakang pendidikan yang memadai, namun dari sisi kuantitas belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sistem manajemen Pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik di tingkat organisasi sampai ke level individu. Untuk itu perlu diterapkan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien seperti evaluasi terhadap peta dan kelas jabatan yang telah disusun.

Telah dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM BPOM antara lain dengan penyusunan standar kompetensi jabatan, penyusunan manajemen talenta, penyusunan kurikulum diklat teknis pembentukan dan berjenjang. Sampai saat ini sudah disusun 39 dokumen pengembangan kompetensi yang sudah dan/atau 90% sedang proses penetapan Perka BPOM. Sedangkan sisa 24 dokumen dalam proses finalisasi pembahasan. Namun, seiring dengan terjadinya perubahan regulasi, yaitu dengan ditetapkannya PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan LAN 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap standar kompetensi dan dokumen pengembangan kompetensi yang sudah disusun.

2. Penguatan Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan dan untuk menindaklanjuti ekspektasi pemangku kepentingan diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Substansi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 pada prinsipnya meliputi penajaman tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM dalam rangka penguatan kelembagaan BPOM. Selain itu, juga penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui pengembangan Inspektorat menjadi Inspektorat Utama serta penguatan fungsi cegah tangkal, investigasi, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan melalui pembentukan Deputy Bidang Penindakan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penguatan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai POM di seluruh provinsi. Selain di tingkat provinsi, dibutuhkan pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota tertentu secara bertahap sesuai kebutuhan pengawasan berdasarkan rekomendasi Kepala Daerah serta kriteria klasifikasi UPT.

Pembentukan 40 UPT BPOM di Kabupaten/Kota telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan BPOM 11/2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM dan Peraturan BPOM No. 12 tahun 2018 tentang OTK UPT di Lingkungan BPOM, namun pembentukan UPT di lingkungan P3OMN (Balai Pengujian Produk Biologi dan Toksikologi, Balai Kalibrasi, dan Balai Pengujian Investigasi Obat dan Makanan) masih dibahas dengan Kementerian PANRB untuk mendapatkan persetujuan prinsip.

3. Peningkatan Pelayanan Publik.

Menyadari bahwa pada hakekatnya instansi Pemerintah merupakan “pelayan Masyarakat”, BPOM senantiasa membenah diri untuk dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima. Peningkatan layanan publik terhadap dunia usaha dilakukan melalui: (1) debirokratisasi dan deregulasi; (2) peningkatan pelayanan prima termasuk sarana prasarana; dan (3) pengembangan teknologi informasi.

BPOM telah merancang inovasi baru untuk kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengakses pelayanan publik di bidang registrasi Obat dan Makanan dengan berbasis teknologi informasi seperti *e-Registration* Kategori Registrasi Variasi, New AeRO, Integrasi *e-Registration* Obat Copy dengan Obat baru, *Reengineering* Sistem Notifikasi Kosmetik, *Subsite* Direktorat Registrasi Pangan Olahan, *e-Registration* pangan, *BPOM Mobile*, dan Sertifikat Elektronik BsrE (Balai Sertifikat Elektronik).

4. Peningkatan jejaring kerja sama di dalam dan luar negeri.

BPOM menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu BPOM mengembangkan kerja sama dengan K/L, baik di pusat, daerah, maupun luar negeri. Jaringan yang luas ini sangat strategis posisinya dalam mendukung tugas-tugas BPOM maupun pemangku kepentingan.

Penguatan fungsi regulatori pengawasan Obat dan Makanan di negara selatan-selatan telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) program Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) dengan negara: Timor Leste, Maroko-Tunisia (sebagai bagian dari program *Riverse Linkage* Bappenas), dan Palestina. Kegiatan sangat dinamis dan melibatkan banyak pihak lintas sektor. Salah satu kendala adalah ketidakpastian kehadiran peserta dari Palestina, karena mereka harus melalui berbagai *check points* Israel dan juga sempat tertahan di Border Israel dan Mesir sebelum menuju Jakarta.

5. Penguatan akuntabilitas melalui penguatan pengawasan internal.

Agar akuntabilitas pelaksanaan anggaran dibutuhkan perkuatan pengawasan internal dan pendampingan kepada unit kerja oleh Inspektorat BPOM.

6. Penguatan pengawalan pembentukan dan implementasi regulasi.

Telah banyak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan teknis pelaksanaan tugas fungsi BPOM. Namun, Peraturan Perundang-undangan yang ada selama ini kurang mendukung tercapainya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Demikian pula sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan belum memberikan efek jera sehingga sering terjadi kasus berulang.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) telah dilakukan secara intensif dengan pembentukan Tim Percepatan RUU POM dan koordinasi lintas sektor. RUU POM telah masuk dalam Program Legislasi RUU prioritas tahun 2018 dan telah disusun draf Naskah Akademik dan draf RUU POM oleh Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI namun masih perlu penyamaan persepsi terkait substansi RUU POM baik dengan Komisi IX DPR maupun dengan Kementerian/Lembaga termasuk *stakeholder* terkait.

7. Peningkatan pemberian bantuan hukum terhadap kasus-kasus di bidang Obat dan Makanan.

Sekretariat Utama memberikan bantuan hukum, termasuk menangani perkara hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas. Tantangan ke depan, BPOM harus membuat terobosan dalam penegakan hukum seperti memperkuat kemitraan untuk pengawasan, penindakan, maupun persamaan persepsi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait, menggeser pengawasan ke area preventif, serta memperkuat kerja sama perdagangan lintas batas dan *Free Trade Zone Area*.

8. Penguatan *e-Government*

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dilakukan melalui penerapan *e-Government* atau penggunaan teknologi informasi di lingkungan BPOM, diantaranya pendaftaran Obat dan Makanan dan berbagai penyelenggaraan manajemen Pemerintahan lainnya dilakukan secara elektronik. Berbagai sistem

mutu dan pengembangan *e-Government* yang dapat meningkatkan kinerja BPOM perlu diintegrasikan agar pelaksanaannya efektif dan efisien.

Pengembangan dan uji coba layanan administrasi kepegawaian terintegrasi berbasis elektronik telah dilakukan bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) namun belum ada arsitektur dan *roadmap* pengembangan aplikasi SIASN.

9. Peningkatan sarana prasarana penunjang kinerja.

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik laboratorium, layanan publik, serta fasilitas pendukung lainnya seperti gedung kantor sesuai standar, lahan parkir yang memadai, jaringan listrik dan air, serta kendaraan operasional maupun laboratorium keliling akan memudahkan BPOM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Reviu standarisasi sarana dan prasarana telah dilakukan dengan disusunnya draf revisi Peraturan Kepala BPOM RI tentang Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan BPOM RI namun belum adanya acuan standar sarana dan prasarana pendukung kinerja ASN menjadi hambatan tersendiri dalam penyusunan perka tersebut.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Penyusunan Kinerja di tahun 2018 dimulai dari melihat ulang dokumen-dokumen terkait dengan perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen rencana strategis (Renstra) BPOM tahun 2015-2019 dan Renstra Sekretariat Utama 2015-2019.

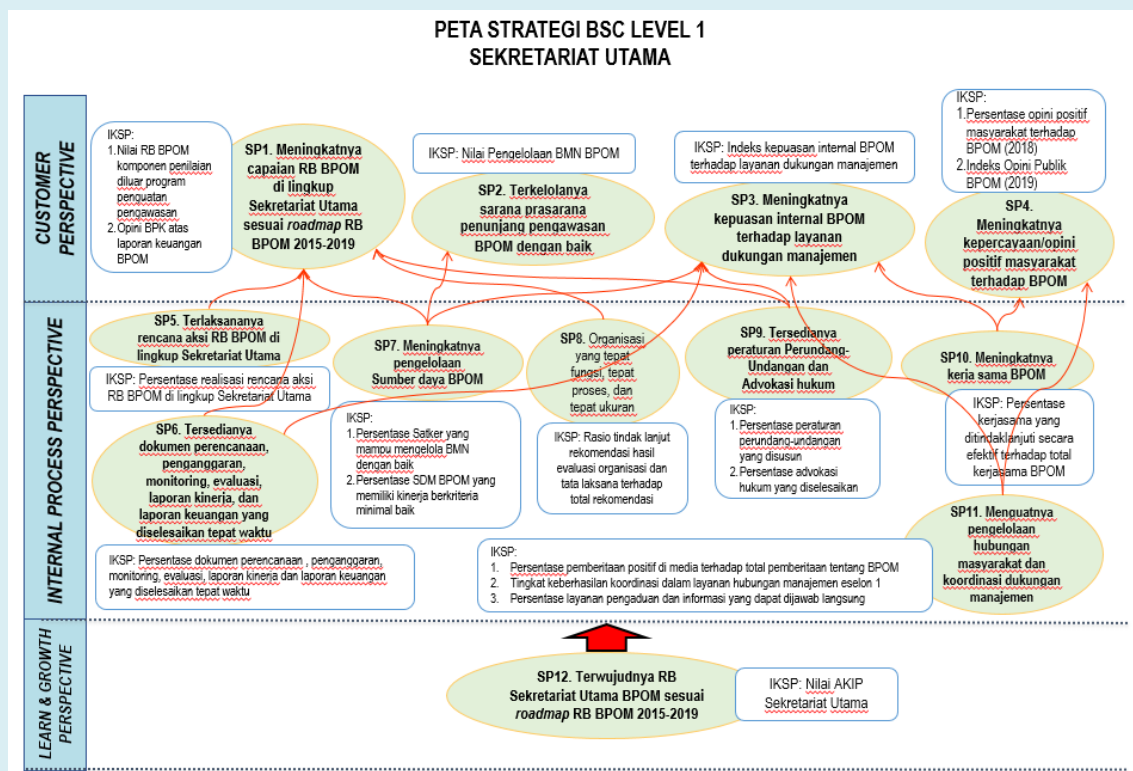
Rencana Strategis BPOM adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) BPOM yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Sekretariat Utama merupakan *platform* Unit Sekretariat Utama atas pelaksanaan Visi dan Misi BPOM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama. Mengingat Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, maka Visi dan Misi Sekretariat Utama yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2015-2019 adalah sama dengan Visi dan Misi BPOM yaitu:



Gambar 6. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama

Tahun 2018 merupakan tahun transisi bagi organisasi dan tata kerja BPOM setelah ditetapkannya Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 dan Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2014, adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L) akan berdampak pada perubahan rencana strategis K/L tersebut. Untuk itu Sekretariat Utama telah melakukan revisi terhadap Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 dengan mengacu Rencana Strategis BPOM 2015-2019, terutama pada sasaran program, indikator, dan target kinerja.

Dalam penyusunan sasaran Program, Sekretariat Utama menetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 17 (tujuh belas) indikator dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:



Gambar 7. Peta Strategi Level 1 Sekretariat Utama

Sasaran program Sekretariat Utama merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis BPOM dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Utama. Sasaran-sasaran yang ditetapkan

sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang akan dicapai Sekretariat Utama. Matriks Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2015–2019 dapat dilihat pada Lampiran 1 laporan ini.

II. PERJANJIAN KINERJA (PK)

A. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM Tahun 2015-2019. Sekretariat Utama telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM pada 7 September 2018. Lampiran perjanjian kinerja berupa matriks yang mencantumkan ketiga sasaran program, indikator kinerja (termasuk Indikator Kinerja Utama) dan target dari setiap indikator, serta alokasi anggaran untuk setiap sasaran program yang dapat dilihat pada Lampiran 3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2018 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Program	Indikator	Target
Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan	51,9
	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP
Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	70
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	60
Meningkatnya kepercayaan/opini positif Masyarakat terhadap BPOM	Persentase opini positif Masyarakat terhadap BPOM	63%
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	100%

Sasaran Program	Indikator	Target
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	87%
	Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	84%
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100%
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100%
	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100%
Meningkatnya kerja sama BPOM	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	70%
Menguatnya pengelolaan hubungan Masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	85%
	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1	60
	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	92%
Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Sekretariat Utama	78

B. PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2018, Sekretariat Utama mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp387.525.735.000,-. Pada bulan Agustus 2018 Sekretariat Utama memperoleh tambahan anggaran dari Satuan Kerja lain untuk tambahan belanja pegawai dalam rangka memenuhi tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp11.310.298.000,- sehingga total anggaran BPOM menjadi Rp398.836.033.000,- yang digunakan untuk melaksanakan 9 kegiatan utama yang terangkum dalam 2 program sebagai berikut:

No.	Program	Semula (Rp)	Revisi (Rp)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya	272.404.735.000	283.715.033.000
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	115.121.000.000	115.121.000.000
	Total	387.525.735.000	398.836.033.000

Untuk mendukung sasaran program, telah ditetapkan arah kebijakan Sekretariat Utama yang mengacu pada arah kebijakan BPOM. Arah kebijakan Sekretariat Utama tersebut dijabarkan dalam program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM. Program ini selanjutnya telah dijabarkan menjadi 9 (sembilan) kegiatan utama oleh 5 (lima) Biro dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala. 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan utama antara lain:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya BPOM yang didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan utama yaitu:
 - a. Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat.
 - b. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri BPOM.
 - c. Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM.
 - e. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana.
 - f. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan.
 - g. Pengelolaan SDM BPOM.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan utama yaitu:
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM
 - b. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM

Berikut anggaran Sekretariat Utama untuk mendukung capaian sasaran program:

Tabel 2. Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2018

Program/Sasaran Program	Pagu
A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	283.715.033.000
1. Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	54.715.019.000
2. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	1.451.731.500
3. Meningkatnya kepercayaan/opini positif Masyarakat terhadap BPOM	19.302.157.000
4. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	2.128.841.500
5. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	7.345.623.000
6. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	4.306.579.000
7. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	1.276.759.500
8. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	3.053.372.000
9. Meningkatnya kerja sama BPOM	7.713.900.000
10. Menguatnya pengelolaan hubungan Masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	14.608.651.500
11. Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	167.812.399.000
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	115.121.000.000
1. Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	3.950.000.000
2. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	701.507.000
3. Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	110.469.493.000

C. PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR DI SEKRETARIAT UTAMA

Terdapat penyesuaian sasaran program dan indikator di tahun 2018, sebagaimana berikut:

Sebelum		Sesudah	
Sasaran Program	Indikator	Sasaran Program	Indikator
1. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Produk Hukum dalam rangka	1. Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan	1. Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	1. Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan

Sebelum		Sesudah	
Sasaran Program	Indikator	Sasaran Program	Indikator
Memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			2. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Kerja Sama	2. Jumlah kerja sama yang efektif	2. Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	3. Nilai Pengelolaan BMN BPOM
	3. Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan	3. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	4. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen
	4. Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	4. Meningkatnya kepercayaan/opini positif Masyarakat terhadap BPOM	5. Persentase opini positif Masyarakat terhadap BPOM
3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	5. Indeks RB	5. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	6. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama
	6. Nilai SAKIP BPOM	6. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	7. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu
	7. Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK	7. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	8. Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik
	8. Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi		9. Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik
		8. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	10. Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi
		9. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	11. Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun
			12. Persentase advokasi hukum yang diselesaikan

Sebelum		Sesudah	
Sasaran Program	Indikator	Sasaran Program	Indikator
		10. Meningkatnya kerja sama BPOM	13. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM
		11. Menguatnya pengelolaan hubungan Masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	14. Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM
			15. Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1
		16. Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	
12. Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	17. Nilai AKIP Sekretariat Utama		

17 (tujuh belas) indikator merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Utama.

Perubahan sasaran program dan indikator pada Sekretariat Utama disebabkan karena :

1. Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan, dan Strategi Revisi Renstra BPOM 2015-2019 dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau mungkin timbul serta dengan memperhatikan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM .
2. Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal dan internal yang dihadapi oleh Sekretariat Utama pada tahun 2015-2019 diantaranya dinamika dan *demand* peraturan perundang-undangan (regulasi), pengembangan dan efektivitas jejaring kerja sama, perkembangan teknologi informasi, tantangan reformasi perencanaan, penganggaran, dan keuangan, pemenuhan dan penataan sarana dan prasarana, serta komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

3. Menghadapi lingkungan strategis tersebut, Sekretariat Utama dituntut untuk: meningkatkan capaian RB BPOM sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019; meningkatkan pengelolaan sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik; meningkatkan kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen; meningkatkan kepercayaan/opini positif Masyarakat terhadap BPOM; meningkatkan pelaksanaan rencana aksi RB BPOM; menyediakan dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan tepat waktu; meningkatkan pengelolaan Sumber daya BPOM; mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran; menyediakan peraturan Perundang-undangan dan advokasi hukum; meningkatkan kerja sama dalam dan luar negeri; serta memperkuat pengelolaan hubungan Masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen.
4. Penambahan 1 (satu) unit kerja yaitu Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan berfungsi untuk koordinasi dan pemberian dukungan strategis kepada pimpinan, keprotokolan, dan urusan kesekretariatan pimpinan.

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja per triwulan. Pemantauan dan pengendalian capaian rencana aksi perjanjian kinerja telah dilakukan setiap triwulan melalui pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Selain itu juga dilakukan pelaporan triwulanan melalui aplikasi secara online yaitu *e-Performance* BPOM dan monitoring pelaksanaan rencana pembangunan (*e-monev* Bappenas versi 3.0) berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006. Capaian per triwulan dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

III. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:






$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Sekretariat Utama, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{(\text{bobot} \times \% \text{capaian})_1 + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_2 + \dots (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran

Status	Capaian Indikator	Penjelasan
	$100\% < \chi \leq 125\%$	Memuaskan
	100%	Baik
	$75\% \leq \chi < 100\%$	Cukup
	$< 75\%$	Kurang
	$> 125\%$	Tidak Dapat Disimpulkan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

I. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra 2015-2019. Laporan kinerja tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai evaluasi kegiatan yang berjalan selama tahun 2018 dan dapat dijadikan masukan untuk perbaikan perencanaan sampai dengan akhir periode Renstra. Evaluasi yang dilakukan pada 12 (dua belas) sasaran program dengan 17 (tujuh belas) indikator yang telah ditetapkan seperti dijabarkan pada BAB II, maka beberapa indikator sasaran program yang telah melebihi target akhir periode Renstra, perlu direviu.

1.1. CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Tabel 4. Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2018

<i>PERPECTIVE / SASARAN PROGRAM</i>	NPS	KRITERIA
A. Customer Perspective	108,05	Memuaskan
1. Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	99,20	Cukup
2. Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	98,83	Cukup
3. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	128,93	Tidak Dapat Disimpulkan
4. Meningkatnya kepercayaan/opini positif Masyarakat terhadap BPOM	105,24	Memuaskan
B. Internal Process Perspective	101,18	Memuaskan
5. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	92,24	Cukup
6. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100,00	Baik
7. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	99,44	Cukup

<i>PERPECTIVE / SASARAN PROGRAM</i>	NPS	KRITERIA
8. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	100	Baik
9. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	100	Baik
10. Meningkatnya kerja sama BPOM	100	Baik
11. Menguatnya pengelolaan hubungan Masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	116,60	Memuaskan
C. Learning and Growth Perspective	94,05	Cukup
12. Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	94,05	Cukup

NPS tahun 2018 sebesar 101,09 (Memuaskan). Nilai ini terbentuk dari agregasi realisasi kinerja indikator-indikator turunannya atau pembentuknya dibandingkan terhadap angka target dalam satu tahun.

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing sasaran program Sekretariat Utama Tahun 2018 seperti pada tabel berikut:

Tabel 5. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2018

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
Customer Perspective							
1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	1	Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan	-	51,9	51,28	98,81
		2	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	-	WTP	WTP	100,00
2	Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	3	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	-	70	69,18	98,83
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	4	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	-	60	77,36	128,93
4	Meningkatnya kepercayaan/opini	5	Persentase opini positif Masyarakat terhadap BPOM	%	63	66,3	105,24

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	positif Masyarakat terhadap BPOM						
Internal Process Perspective							
5	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	6	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	%	100	92,24	92,24
6	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	7	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100,00	100,00
7	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	8	Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	%	87	81,4	93,56
		9	Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	%	84	86	102,38
8	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	10	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	%	100	100	100,00
9	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	11	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	%	100	100	100,00
		12	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	%	100	100	100,00
10	Meningkatnya kerja sama BPOM	13	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	%	70	70	100,00
11	Menguatnya pengelolaan hubungan Masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	14	Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	%	85	99,3	116,82
		15	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1	-	60	77,05	128,42
		16	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	%	92	96,2	104,57
Learning and Growth Perspective							

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
12	Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	17	Nilai AKIP Sekretariat Utama	-	78	73,36	94,05

1.2. ANALISIS CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Sasaran 1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019
IKU	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan 2. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM 	

Keberhasilan pencapaian sasaran pertama ini diukur dengan 2 (dua) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 6. Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2018

No	Indikator	2019	2018				2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan	54,3	51,9	51,28	98,81	94,44	-	50,27	-	-	49,25	-	-	-	-
2	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	100	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100

Indikator kinerja yang pertama adalah “Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan” adalah 51,28 dari target 51,9, sehingga capaian indikator adalah 98,81%.

Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan dihitung berdasarkan penilaian RB yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB untuk Komponen Penilaian (Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) dan Komponen Hasil (Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Survei Internal Integritas Organisasi) berdasarkan hasil penilaian lembar kerja evaluasi Kementerian PANRB.

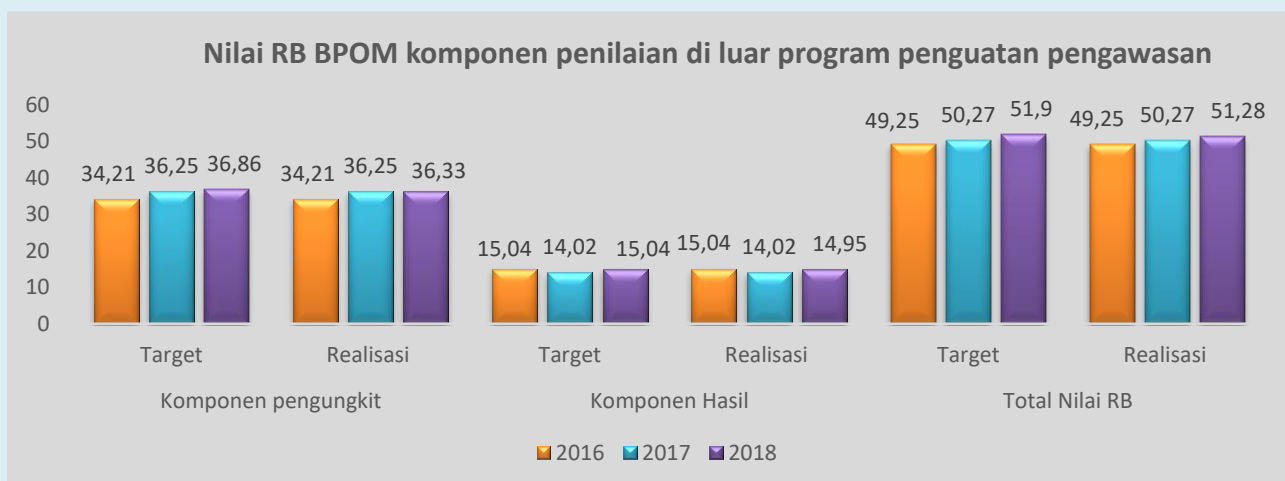
Cara perhitungan indikator Nilai RB BPOM komponen penilaian di luar program penguatan pengawasan adalah hasil evaluasi pelaksanaan RB yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB untuk komponen pengungkit (proses), meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian lembar kerja evaluasi pelaksanaan RB. Sedangkan komponen hasil meliputi nilai akuntabilitas kinerja dan survei internal integritas organisasi.



Gambar 8. Kerangka Logis Evaluasi RB

Nilai RB BPOM komponen penilaian di luar program penguatan pengawasan tahun 2018 diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator	2018		
		T	R	%
A.	Komponen Pengungkit	36,86	36,33	98,56
1	Nilai RB BPOM Manajemen Perubahan	3,73	3,72	99,73
2	Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2,85	2,71	95,09
3	Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi	4,14	4,01	96,86
4	Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana	4,00	3,93	98,25
5	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	13,15	12,93	98,33
6	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,62	4,64	100,43
7	Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4,37	4,39	100,46
B.	Komponen Hasil	15,04	14,95	99,40
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	11,56	10,41	90,05
2	Survei Internal Integritas Organisasi	3,48	4,54	130,46
Total		51,9	51,28	98,81



Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 51,28 (98,81%) dari target 51,9. Namun capaian 2018 meningkat jika dibandingkan pada tahun 2017 dengan capaian 50,27. Tidak tercapainya indikator tersebut dikarenakan beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:

- Perlu diberikan pemahaman kepada pegawai akan arti pentingnya pemahaman tugas fungsi dan ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditetapkan dalam uraian tugas (*job description*) /perjanjian kinerja;

- b. Meginternalisasikan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan nyata kepada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan BPOM;
- c. Setiap agen perubahan mempunyai target kinerja yang terukur dan rencana aksi perubahan, baik sebagai individu maupun instansi;
- d. Menerapkan manajemen SDM Aparatur dengan sistem *merit* sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPOM;
- e. Menghitung kebutuhan jumlah pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dengan ditetapkannya PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilarang untuk mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan:
- f. Membangun mekanisme pola karir dan menerapkan pengembangan pola karir secara transparan, sehingga memungkinkan bagi pegawai yang berada di daerah mendapatkan promosi di pusat,
- g. Mempercepat pengisian jabatan pimpinan khususnya jabatan struktural yang lowong sehingga tidak terjadi rangkap jabatan ataupun pelaksana tugas dalam waktu yang terlalu lama:
- h. Penerapan anggaran berbasis kinerja dengan mensinkronkan antara perencanaan, anggaran, dan kinerja yang berorientasi hasil. Menyempurnakan rumusan ukuran kinerja secara berjenjang dan pemantauan dan pengukuran kinerja tersebut secara elektronik di seluruh level organisasi secara berkala;
- i. Melakukan survey internal dan eksternal secara berkala kepada stakeholders;
- j. Melakukan evaluasi atas sistem layanan berbasis teknologi informasi yang sudah ada serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut;
- k. Peningkatan pelayanan prima dengan memperbaiki kapasitas SDM pemberi layanan melalui berbagai jenis pelatihan dan bimbingan teknis, khususnya terkait layanan langsung kepada stakeholder/Masyarakat.

Kegiatan tahun 2018 yang menunjang pencapaian indikator dan upaya peningkatan tahun 2019 antara lain :

1. Manajemen Perubahan

- a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan 2018 berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No.HK.04.1.22.03.18.1314 dengan

menunjuk Kepala PPSDM Pengawasan Obat dan Makanan sebagai koordinator pelaksana Manajemen Perubahan.

- b. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- c. Penetapan *Quick Wins* BPOM tahun 2018 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.1.82.02.18.0922 tentang Penetapan *Quick Wins* Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018, yaitu: *Digital Signature* e-registrasi pangan, e-SKE Pangan, dan Respon cepat terkait isu Obat dan Makanan
- d. Optimalisasi *website* internal BPOM (siasn.pom.go.id) sebagai media untuk mengkomunikasikan perubahan BPOM, selain media komunikasi lainnya (WA group, twitter, instagram)
- e. Menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
- f. Komunikasi dan diskusi langsung Kepala BPOM dengan pegawai generasi milenial/agen perubahan BPOM (Pusat dan Balai) tentang arti pentingnya perubahan, sekaligus menjaring ide/gagasan perubahan dari pegawai BPOM (Tahun 2017, Bets I dan II tahun 2018)
- g. Pembentukan agen perubahan di seluruh unit kerja sebagai fasilitator dalam mengkomunikasikan/internalisasi/sosialisasi makna pentingnya perubahan di BPOM.
- h. *Workshop* Agen perubahan sebagai agen dalam rangka mensosialisasikan dan internalisasi budaya dan pola pikir.
- i. Pelatihan revolusi mental dengan mayoritas peserta para agen perubahan dengan kewajiban melakukan revolusi cara kerja setelah mengikuti pelatihan.
- j. Evaluasi *value*/nilai organisasi dalam budaya organisasi BPOM terkait relevansi dengan kondisi BPOM dan tantangan saat ini.

Upaya peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan pencapaian indikator dilakukan melalui Penyusunan strategi komunikasi perubahan dan kebijakan pimpinan BPOM dan setiap agen perubahan harus membuat rencana tindak berdasarkan nilai organisasi, perubahan apa yang ingin dicapai dan rencana tindak lanjutnya.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

- a. BPOM telah melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian besar peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron. Identifikasi dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan;
- b. Memiliki sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/*Policy Paper*, dan Paraf Koordinasi.

Upaya peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan pencapaian indikator dilakukan melalui pengkajian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan, pelaksanaan konsultasi publik, dan simplifikasi regulasi (pencabutan, revisi/perubahan) serta pengembangan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Telah dilakukan evaluasi penataan organisasi pada seluruh UPT di lingkungan BPOM:

1. Penyusunan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM
2. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM (dasar pembentukan 40 Loka POM di Kabupaten/Kota)

Upaya peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan pencapaian indikator dilakukan melalui pembangunan instrumen evaluasi kelembagaan berbasis elektronik.

4. Penataan tatalaksana

- a. Penyusunan peta proses bisnis BPOM mengacu Permen PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.223.06.18.3195 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) ISO 9001:2015 BPOM (memuat peta proses bisnis, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi, dan daftar rekapitulasi SOP Makro BPOM), serta pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001:2015 atas BPOM sebagai entitas lembaga, 28 (dua puluh delapan) unit kerja pusat, dan 32 (tiga puluh dua) UPT Balai Besar/Balai POM.

- b. Penerapan manajemen kearsipan yang handal dengan Pembentukan Tim Keamanan Data dan Informasi bekerja sama dengan PUSDATIN, Bimbingan Teknis Penataan arsip di unit kerja pusat dalam hal pengelolaan arsip aktif, Pengadaan *secure paper* untuk jenis dan kategori naskah dinas yang memerlukan kertas berpengaman khusus seperti : sertifikat, nomor ijin edar dan hasil pengujian, Revisi Pedoman Tata Naskah Dinas, Revisi dan penyusunan instrumen kearsipan, Pra Pengawasan Kearsipan ke unit kerja Pusat dan Daerah, Pembinaan SDM Kearsipan pada tanggal 22 Oktober 2018, Pemusnahan arsip di BPOM Pusat dan Daerah.

Upaya peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan pencapaian indikator dilakukan melalui: (1). integrasi sistem mutu BPOM berdasarkan ISO 9001:2015 dengan ISO/IEC 17025:2017 dan Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Balai POM di Mamuju dan 2 (dua) Loka POM yang baru dibentuk, (2). Elektronisasi pemberian nomor surat dan implementasi Sistem Informasi kearsipan Dinamis di lingkungan BPOM.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM
 - a. Menyusun strategi pengelolaan SDM BPOM
 - b. Menyusun arsitektur sistem layanan kepegawaian BPOM
 - c. Mengelola penyusunan kebutuhan SDM BPOM
 - d. Melakukan survei opini dalam rangka menyusun strategi *roadmap engagement* SDM BPOM
 - e. Menyusun monitoring penilaian prestasi kerja secara triwulan melalui aplikasi e-SKP
 - f. Penyusunan peraturan terkait pedoman kearsipan untuk menjamin kerahasiaan tata naskah dinas di BPOM
 - g. Relokasi pelayanan publik satu gedung
 - h. Penataan ruang luar kantor
 - i. Penyediaan fasilitas sistem antrian mobile dan informasi digital

Upaya peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan pencapaian indikator dilakukan melalui sinkronisasi antara data *e-Performance* dengan data e-SKP, sehingga kinerja individu terlihat cascadingnya mendukung kinerja organisasi, selain hal tersebut pada tahun 2019 Biro Umum dan SDM akan menerapkan e-tukin dimana

hal ini terkoneksi antara *finger print*, SKP triwulan serta peraturan-peraturan terkait *reward/punishment*.

6. Penguatan Akuntabilitas

- a. Bimbingan teknis perencanaan strategis bagi seluruh unit pusat dan BB/BPOM, agar dapat melakukan penyusunan Renstra sesuai OTK baru.
- b. Bimtek SAKIP dan Monev *Online*, untuk meningkatkan kemampuan staf pengelola data menginput aplikasi monev online (*e-performance*) dan menyusun Laporan kinerja unitnya.
- c. Mengembangkan Manajemen Kinerja BPOM, dengan melakukan pembahasan cascading indikator dari level 2, ke level 3 hingga level 4.
- d. Memantau pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
- e. Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Pengawasan Obat dan Makanan, untuk membahas perencanaan program/kegiatan tahun 2019.
- f. Rapat Evaluasi Nasional untuk membahas Evaluasi capaian program/kegiatan tahun 2018.

Upaya peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan pencapaian indikator dilakukan dengan analisis hubungan/turunan kinerja pada level yang ada dibawahnya sampai ke unit kerja terkecil, bahkan sampai ke level individu (*Cascading*) untuk rumusan hasil dan ukuran kinerja, serta dilengkapi dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Melakukan survei unit pelayanan publik
- b. Melakukan evaluasi keluhan/saran/masukan dan penetapan CAPA berdasarkan hasil survei IKM eksternal tahun 2018
- c. Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi survei kepuasan Masyarakat secara berkala
- d. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat telah diintegrasikan dalam *subsite* Keamanan Pangan dengan alamat url: (1). <http://registrsipangan.pom.go.id>, (2). <http://asrot.pom.go.id/asrot>, (3). <http://notifikos.pom.go.id>, <http://RB.pom.go.id>, (4). <http://sireka.pom.go.id/>.

- e. Penyempurnaan media pengaduan pelayanan melalui (1). Email *penilaianpangan@pom.go.id*, (2). kotak saran di ruang pelayanan pendaftaran produk pangan, (3). telepon ke Unit, SMS ke Kepala Unit ke (081199133050), (4). *Live Chat, Call Center* Unit ke (0813 9913 3050), (5). konsultasi tatap muka (dengan pendaftaran konsultasi via sms), (6). kontak kami melalui sistem *e-registration* dan *subsite* direktorat penilaian keamanan pangan, (7). melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BPOM (via website, sosial media, telepon, sms, fax).
- f. Monev Integrasi media pengaduan pelayanan publik *online* melalui (1). pelaksanaan penerapan TTE dan 2D *barcode* pada Surat Keputusan Persetujuan Registrasi OT lowrisk dan Registrasi Khusus Ekspor OT dan SK disertai simplifikasi alur dan dokumen persyaratan per tanggal 1 November 2018, (2). Pelaksanaan penerapan TTE pada SJKE Pangan, (3). pelayanan publik yang sudah *online* sudah terintegrasi dengan *e-payment*, (4). pelayanan publik yang *offline* terintegrasi dengan *webform simpony*.

Upaya peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan pencapaian indikator dilakukan melalui :

- a. Peningkatan pemahaman pegawai akan tugas fungsi dan ukuran keberhasilan dalam uraian tugas (*job description*) / perjanjian kerja.
- b. Pengembangan berbagai jenis pelatihan dalam meningkatkan nilai-nilai budaya pelayanan prima, dan mengimplementasikan sistem *reward* dan *punishment*, guna memberikan motivasi bagi pemberi dan pengguna layanan.
- c. Pengembangan survei eksternal pada setiap jenis pelayanan, menindaklanjuti hasil survei yang difokuskan pada unsur yang mendapat nilai lebih rendah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
- d. Penambahan dan peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kinerja.

Indikator kinerja yang kedua adalah “Opini BPK atas laporan keuangan BPOM” adalah WTP dari target WTP, sehingga capaian indikator adalah 100%.

Cara perhitungan Opini BPK atas laporan keuangan BPOM adalah penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan RI dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim. Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bahwa Opini

merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2018, upaya ini membuahkan hasil dengan diakuinya perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan BPOM oleh BPK berupa pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPOM tahun 2017. Opini WTP ini merupakan yang keempat secara berturut-turut setelah sebelumnya juga meraih penghargaan WTP pada tahun 2017 atas Laporan Keuangan Tahun 2016.

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Opini BPK atas laporan keuangan BPOM tahun 2018 antara lain:

1. Pelaksanaan Bimtek Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan (pusat dan BB/BPOM).
2. Reviu kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan.
3. Pelatihan Laporan Keuangan.
4. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM.

BPOM juga telah menyusun arah kebijakan untuk mempertahankan opini WTP dengan berbagai strategi. Pertama, pemantapan komitmen di semua level dan unit kerja dalam penerapan *Quality Management System* (QMS), Sistem Pemerintah Intern Pemerintah (SPIP) dan Reformasi Birokrasi (RB). Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan dan penyajian Laporan Keuangan BPOM sesuai SAP. Ketiga, intensifikasi monitoring pada proses dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI.

Upaya peningkatan tahun 2019 yaitu BPOM akan secara terus menerus melakukan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan BPOM sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, berkaitan dengan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yaitu PNBPF fungsional, Penerimaan PNBPF Lainnya, Potongan tulin dalam Belanja Pegawai, Kesalahan Penganggaran, Pengelolaan Persediaan, Pengelolaan Aset Tetap, Pelaksanaan Belanja Barang dan Pelaksanaan Belanja Modal.

Sasaran 2	Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik
IKU Nilai Pengelolaan BMN BPOM	

Keberhasilan pencapaian sasaran kedua ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 7. Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2018

No	Indikator	2019	2018				2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	72	70	69,18	98,83	96,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja yang pertama adalah “Nilai Pengelolaan BMN BPOM” adalah 69,18 dari target 70, sehingga capaian indikator adalah 98,83%.

Nilai Pengelolaan BMN BPOM dihitung berdasarkan nilai aspek pengelolaan BMN sesuai ketentuan yaitu rata-rata Nilai Pemusnahan, Penghapusan Barang Usang/Rusak, dan Penetapan Status Penggunaan BPOM, nilai kepatuhan pelaporan BPOM dan nilai Sertifikasi BMN BPOM.

Nilai Pengelolaan BMN BPOM belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 98,83%, secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena:

1. Belum seragamnya kepedulian Satker-satker terhadap pengelolaan BMN.
2. Masih kurangnya Sosialisasi terkait peraturan-peraturan terkait pengelolaan BMN baik ditingkat Kuasa pengguna Barang maupun Pengelola BMN yang ada di tiap Satker.

Kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian indikator ini adalah kurangnya peran serta seluruh Kuasa Pengguna Barang dan kurangnya komitmen dalam mengelola BMN dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.

Selama tahun 2018, BPOM telah Melakukan kegiatan sertifikasi terhadap 41 satker pengguna BMN dan 2 unit Satker baru (Kedeputian IV dan PPSDM) yang dalam proses tahap sosialisasi.

Upaya Peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan indikator ini dengan Pemberian Sosialisasi ataupun penghargaan kepada Satker Pengelola BMN dengan nilai paling baik.

Sasaran 3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen
IKU <i>Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen</i>	

Keberhasilan pencapaian sasaran ketiga ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 8. Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2018

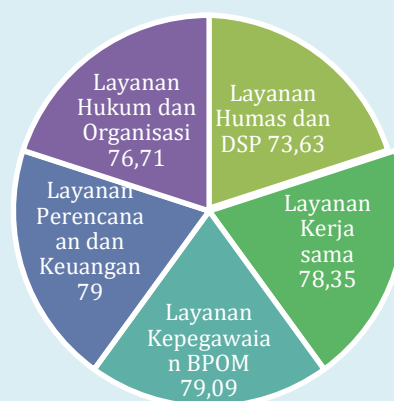
No	Indikator	2019	2018				2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	61	60	77,36	128,93	126,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja yang pertama adalah “Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen” adalah 77,36 dari target 60, sehingga capaian indikator adalah 128,93%.

Persentase Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen merupakan indikator baru yang baru diukur pada Tahun 2018 ini.

Indikator ini merupakan pengukuran tingkat kepuasan seluruh unit kerja di BPOM yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat unit kerja BPOM terhadap layanan Biro Humas dan DSP, Biro Kerja Sama, Biro Umum dan SDM, Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Biro Hukum dan Organisasi.

Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen dihitung berdasarkan hasil Survei kepuasan SDM BPOM terhadap layanan dukungan manajemen yang dinilai dari nilai kepentingan dan kepuasan (masing-masing dihitung dalam skala likert).



Survei layanan dukungan manajemen di Sekretariat Utama antara lain :

1. layanan Biro Humas dan DSP meliputi : (1). Publikasi kegiatan strategis BPOM di akun media sosial resmi BPOM, (2). Siaran pers/ penjelasan/ klarifikasi BPOM, (3). Berita aktual kegiatan di *website* BPOM, (4). Monitoring berita harian dan pemantauan isu terkait Obat dan Makanan, (5). Koordinasi dalam penanganan pengaduan Masyarakat, (6). Penyusunan informasi terkini/standar jawaban bagi petugas layanan ULPK dan Contact Center HaloBPOM, (7). Koordinasi dan/atau keterlibatan dalam pelaksanaan KIE Obat dan Makanan (sebagai narasumber, pramujaga, penyediaan produk informasi), (8). Penyediaan data layanan informasi dan pengaduan Masyarakat serta Pengelolaan Produk Informasi dan Dokumentasi (PPID), (9). Koordinasi dan ketersediaan bahan substansi kegiatan Kepala BPOM, (10). Pelaksanaan desk dalam rangka monitoring dan evaluasi program strategis pimpinan, (11). Penjadwalan kegiatan yang menghadirkan Kepala BPOM, (12). Penjadwalan kegiatan yang menghadirkan Pejabat Eselon I (Sestama/ Deputi 1/ Deputi 2/ Deputi 3/ Deputi 4), (13). Tata persuratan dari/ kepada Kepala BPOM, (14). Tata persuratan dari/ kepada Kepala BPOM Pejabat Eselon I (Sestama/ Deputi 1/ Deputi 2/ Deputi 3/ Deputi 4), (15). Pelayanan protokoler pada kegiatan pimpinan, (16). Penyelenggaraan apel bulanan/ upacara peringatan hari besar nasional.
2. Layanan Biro Kerjasama meliputi: (1). Penyusunan naskah kesepakatan bersama (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) BPOM dengan lintas sektor di dalam negeri, (2). Penyiapan bahan kerjasama dengan pihak mitra luar negeri secara bilateral, maupun dalam forum regional dan multilateral, (3). Penyelesaian persetujuan dan *exit permit* perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri.
3. Layanan Kepegawaian BPOM meliputi: (1). Proses mutasi pegawai, (2). Proses Kenaikan Pangkat/Jabatan (3). Proses Pensiun, (4). Proses Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan, (5). Proses Pengangkatan dan Pemberhentian dari PNS, (6). Sistem Informasi Kepegawaian (SIAP, e-cuti, e-SKP, Sisfo dll), (7). Proses Pemberian Penghargaan (Satya lencana, pegawai teladan), (8). Proses Disiplin PNS (9). Proses Konseling PNS, (10). layanan kerumahtanggaan dan BMN.
4. Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan meliputi (1). Penyusunan revisi renstra, (2). Penyusunan perencanaan kinerja berbasis BSC (Peta Strategi), (3). Penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja, RKT, PK), (4). Penyusunan RKAKL, DIPA, POK, (5). Revisi DIPA/POK, (6). Penyusunan juklak anggaran dan juknis pelaksanaan kegiatan, (7). Penyusunan pedoman rkakl, (8). Penyusunan laporan kinerja (Bimtek

SAKIP), (9). Monev kinerja dan anggaran baik secara manual maupun online (SMART, Bappenas, Tepra, *e-Performance*), (10). Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, (11). Pengelolaan perbendaharaan, (12). Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, (13). Penyusunan laporan keuangan.

5. Layanan Biro Hukum dan Organisasi meliputi: (1). Penyusunan peraturan perundang-undangan di BPOM, (2). Penyusunan rumusan perjanjian (MOU, Perjanjian Kerja Sama) di BPOM, (3). Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di BPOM, (4). Advokasi hukum di BPOM terkait pemberian pertimbangan dan konsultasi hukum, (5). Advokasi hukum di BPOM terkait penanganan perkara saksi/ahli, (6). Layanan Advokasi hukum di BPOM terkait pendampingan hukum saksi/ahli, (7). Advokasi hukum di BPOM terkait penyuluhan hukum, (8). Pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi di BPOM, (9). Ketatalaksanaan (fasilitasi penyusunan peta proses bisnis, peta lintas fungsi, SOP Makro dan/atau Mikro, serta penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015) di BPOM, (10). Pelaksanaan koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi, (11). Pemanfaatan *subsite* jdih.pom.go.id, (12). Pemanfaatan *subsite* sistem Manajemen Mutu BPOM (qms.pom.go.id).

Capaian indikator Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen tahun 2018 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 126,66% dengan kategori tidak dapat disimpulkan, hal ini dikarenakan survei yang dilakukan dari kelima Biro di Sekretariat Utama belum menggunakan metode yang sama dan ada Biro yang jumlah respondennya belum representatif.

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen tahun 2018 antara lain:

1. Layanan Biro Humas dan DSP
 - a. Penyusunan SOP makro POM-01.03/CFM.01/SOP.01 tentang Ketersediaan Dokumen Substansi Teknis Pimpinan, POM-08.01/CFM.01/SOP.01 tentang Keprotokolan, dan POM-08.02/CFM.01/SOP.01 dan Layanan Hubungan Masyarakat.
 - b. Sosialisasi mekanisme kerja dan fungsi Biro Humas dan DSP yang baru kepada seluruh unit di BPOM, yaitu sosialisasi SOP makro POM-01.03/CFM.01/SOP.01 tentang Ketersediaan Dokumen Substansi Teknis Pimpinan. Biro Humas dan DSP juga menyelenggarakan *Focus Group Discussion Benchmarking* fungsi Dukungan

Strategis Pimpinan dan in house training Penulisan Efektif yang diikuti oleh perwakilan unit kerja di BPOM.

- c. Penunjukan narahubung di unit kerja seperti Tim Koordinasi ULPK dan *Contact Center*.
 - d. Pertemuan dan komunikasi secara berkala dengan unit terkait sehingga bisa menjangkau aspirasi, informasi terkini, dan melakukan perbaikan di Biro HDSP.
2. Layanan Biro Kerjasama
- a. Penyusunan SOP Makro POM-13.01/CFM.01/SOP.01 tentang Penyusunan Perjanjian Kerja Sama, POM-13.01/CFM.01/SOP.02 tentang Pengembangan Jejaring Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri, POM-13.01/CFM.01/SOP.03 tentang Penyiapan Kertas Posisi, dan POM-13.01/CFM.01/SOP.04 tentang Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.
 - b. Pengembangan aplikasi sistem informasi *database* MoU/Perjanjian Kerja Sama BPOM berbasis website pada tautan kerjasama.pom.go.id. Aplikasi ini ditujukan untuk memudahkan unit kerja mendapatkan akses informasi kerja sama yang dimiliki oleh BPOM.
 - c. Peningkatan koordinasi Biro Kerja Sama melalui rapat koordinasi, komunikasi melalui telepon, e-mail dan *whatsapp group*.
 - d. Peningkatan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka penyiapan bahan kunjungan kerja Kepala BPOM ke luar negeri.
3. Layanan Kepegawaian BPOM
- a. Telah ada ruang konseling BPOM untuk meningkatkan kesehatan rohani pegawai, sehingga *engagement* terhadap layanan kepada pegawai telah meningkat selain kesehatan jasmani dengan penyediaan klinik yang berijin
 - b. Pemberian penghargaan kepada pegawai teladan selalu diberikan pada saat acara HUT BPOM ataupun saat Rapat Evaluasi Nasional, sehingga memberikan semangat pegawai untuk berkinerja
4. Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan
- a. Melakukan perkuatan koordinasi di Biro Perencanaan dan Keuangan yang dilakukan melalui rapat koordinasi internal, komunikasi melalui telepon, e-mail, *whatsapp group*.
 - b. Menerima konsultasi masalah yang dihadapi unit kerja Pusat dan BB/BPOM terkait masalah penganggaran, perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan. Konsultasi dapat melalui tatap muka, komunikasi melalui telepon, *whatsapp* maupun e-mail.
 - c. Melakukan pembinaan jabatan fungsional Perencana.

5. Layanan Biro Hukum dan Organisasi
 - a. Melakukan perkuatan koordinasi Biro Hukum dan Organisasi melalui rapat koordinasi internal, komunikasi melalui telepon, e-mail, *whatsapp group*
 - b. Memfasilitasi pendampingan keterangan saksi/ahli, pemberian pertimbangan hukum serta penyelesaian penanganan perkara hukum di lingkungan BPOM
 - c. Memfasilitasi Unit Teknis BPOM dalam proses *Legal drafting* penyusunan peraturan perundang-undangan dan memfasilitasi Unit Teknis dan Pelaksana Teknis BPOM dalam perumusan perjanjian

Upaya peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan pencapaian indikator dilakukan melalui:

1. Melakukan reviu target indikator.
2. Menyusun metode survei indikator Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen yang sama untuk kelima Biro di Sekretariat Utama.
3. Membuat Sistem Informasi SDM yang terintegrasi yaitu kumpulan dari beberapa aplikasi modul (sub-sistem) siasn yang berbasis pada operasional SDM dan terintegrasi/terkoneksi satu dengan lainnya
4. Melakukan digitalisasi terhadap pekerjaan rutin yang dilakukan, sehingga dapat mempercepat proses serta transparansi kepada seluruh pegawai.
5. Menjadi Satker yang mampu melayani sesuai dengan kebutuhan dan harapan unit kerja di lingkungan BPOM.
6. Percepatan pengembangan aplikasi program dan jalur komunikasi dalam hal pelayanan dukungan manajemen seperti aplikasi monitoring dan evaluasi program strategis pimpinan dan aplikasi persuratan pimpinan.
7. Peningkatan *awareness* dan komitmen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam implementasi Reformasi Birokrasi (RB), *Quality Management System* (QMS), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
8. Perbaikan pengelolaan *Human Capital Management* (HCM) dalam memberikan pelayanan bagi pemangku kepentingan.
9. Peningkatan koordinasi dan penguatan komunikasi secara berkala dengan unit terkait.
10. Penunjukan narahubung di unit kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi program strategis pimpinan.
11. Pengintegrasian sistem informasi kerja sama BPOM pada BPOM Comand Center (BCC) dan menjadi salah satu *subsite* dari *website* BPOM.

12. Sosialisasi terkait tata cara perjalanan dinas luar negeri dan pengajuan persetujuan serta *exit permit* ke luar negeri.
13. Penyusunan pedoman dan *roadmap* kerja sama BPOM
14. Penyusunan panduan penyiapan bahan kerja sama luar negeri BPOM
15. Pengembangan sistem JDIH dalam rangka penyusunan peraturan termasuk sistem pengendalian peraturan perundang-undangan
16. Pengembangan subsite sistem Manajemen Mutu BPOM(qms.pom.go.id)
17. Pembuatan sistem penunjukan permohonan keterangan saksi/ahli melalui aplikasi SIKOFI-OM

Sasaran 4	Meningkatnya kepercayaan/opini positif Masyarakat terhadap BPOM
IKU <i>Persentase opini positif Masyarakat terhadap BPOM</i>	

Keberhasilan pencapaian sasaran keempat ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 9. Pencapaian Sasaran Keempat Tahun 2018

No	Indikator	2019	2018				2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Persentase opini positif Masyarakat terhadap BPOM	65	63	66,63	105,24	102,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja yang pertama adalah “**Persentase opini positif Masyarakat terhadap BPOM**” adalah 66,63 dari target 63, sehingga capaian indikator adalah 105,24%.

Persentase opini positif Masyarakat terhadap BPOM merupakan indikator baru yang baru diukur pada Tahun 2018 ini. Persentase opini positif Masyarakat terhadap BPOM dihitung berdasarkan hasil survei tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap BPOM dengan pendekatan statistik-kuantitatif.

Opini positif Masyarakat terhadap BPOM merupakan persepsi Masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilakukan BPOM di seluruh Indonesia.

Persentase opini positif Masyarakat terhadap BPOM dihitung berdasarkan hasil survei tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap BPOM dengan pendekatan statistik kuantitatif dan kualitatif. Survei ini dilakukan untuk mengevaluasi reputasi BPOM di Masyarakat yang meliputi *awareness, familiarity, favorability, trust*, dan advokasi.

Persentase opini positif Masyarakat terhadap BPOM di tahun 2018 mencapai target yang ditentukan. Hal ini secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan maka kelembagaan dan peran BPOM semakin diperkuat antara lain melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan produk obat dan makanan di lapangan. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan pembentukan Deputy Bidang Penindakan, sehingga BPOM semakin membuktikan kiprahnya dalam memberantas kejahatan di bidang obat dan makanan, dimana pemberitaannya juga terus bergulir di berbagai media.
2. Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM diinstruksikan untuk mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan baik dengan Pemerintah maupun pelaku usaha. Dalam hal ini, dilakukan upaya penyusunan perjanjian kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri dalam berbagai bidang kerja sama yaitu peningkatan pengawasan obat dan makanan, perkuatan kelembagaan, perkuatan jejaring kerja sama, peningkatan kapasitas SDM, serta program komunikasi, informasi, dan edukasi kepada Masyarakat serta pendampingan dan pembinaan UMKM di bidang obat dan makanan. Dengan semakin meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan tersebut, Masyarakat semakin percaya kepada Pemerintah khususnya BPOM.
3. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, maka fungsi daerah dalam melakukan pengawasan obat dan makanan semakin meningkat dan semakin dipercaya oleh Masyarakat.
4. Berdasar Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka BPOM membentuk 40 Kantor BPOM di Kabupaten/Kota. Dengan kehadiran 40 Kantor BPOM di Kabupaten/Kota maka semakin banyak Masyarakat Indonesia yang terlindungi dari

obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Masyarakat juga semakin merasakan kehadiran dan pentingnya keberadaan BPOM.

Selama tahun 2018, BPOM telah melaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain melalui:

1. Publikasi tentang obat dan makanan secara umum maupun hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan BPOM di seluruh Indonesia melalui penerbitan 56 siaran pers, 19 penjelasan/klarifikasi berita, dan 222 berita aktual.
2. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) obat dan makanan aman yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. KIE secara langsung dilakukan melalui penyebaran informasi, sosialisasi, layanan informasi dan pengaduan, pembentukan komunitas Masyarakat, edukasi di area *car free day* (CFD), pameran/klinik konsumen, dll. KIE secara tidak langsung dilakukan melalui berbagai media informasi seperti media sosial (instagram, twitter, fanpage, youtube, sms blast), televisi, radio, surat kabar/majalah/tabloid, media *online*, maupun media promosi lainnya.

Pada tahun 2018, kegiatan KIE merupakan salah satu dari Program Prioritas Nasional dengan target sebesar 126 kegiatan dengan capaian 133 kegiatan atau sebesar 105,6%. Berbagai kegiatan KIE yang dilaksanakan diantaranya KIE langsung ke komunitas Masyarakat, pameran/klinik konsumen, BPOM *goes to campus* termasuk kunjungan pelajar/mahasiswa, edukasi Masyarakat tentang obat dan makanan bersama lintas sektor dengan melibatkan tokoh Masyarakat, pengelolaan media sosial dan elektronik (instagram, dan twitter), penayangan di *televisi commercial* (TVC) di delapan bandara di Indonesia, informasi pada *hanging alley* dan *wall branding* pada *commuterline*, *cover seat* KA. Fajar utama (Jakarta-yogyakarta) dan KA. Jayakarta (Jakarta-surabaya), *adlibs* pada 17 radio (*network radio*) di seluruh Indonesia, artikel di majalah *airline "colours garuda"*, *half wrap body* dan stiker motor angkutan berbasis *online*, dan pemuatan informasi pada *body bus*.

Kegiatan KIE tersebut dilaksanakan dengan melibatkan Masyarakat secara aktif melalui diskusi, tanya jawab serta kuis interaktif. Pada beberapa kegiatan KIE yang dilaksanakan, dilakukan evaluasi kegiatan KIE melalui wawancara dengan peserta maupun melalui kuesioner yang memuat tanggapan peserta terhadap

penyelenggaraan kegiatan. Dari kegiatan KIE ini beberapa poin yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

- a. KIE dilaksanakan tidak hanya oleh BPOM Pusat, tetapi juga oleh 33 Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia yang diperkuat dengan unit pelaksana teknis (UPT) Kantor BPOM di 40 Kabupaten/Kota yang juga melaksanakan kegiatan KIE ke berbagai pelosok daerah dan berbagai media.
 - b. Hasil evaluasi kegiatan diperoleh hasil bahwa sebagian besar Masyarakat menilai kegiatan KIE yang dilaksanakan BPOM sangat bermanfaat untuk Masyarakat terutama kegiatan KIE secara langsung yang dilaksanakan di pelosok/daerah. Masyarakat mengharapkan BPOM lebih banyak melaksanakan kegiatan KIE tersebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin keamanan obat dan makanan.
 - c. KIE yang dilaksanakan dengan melibatkan *Stakeholders* menunjukkan bahwa BPOM bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan meningkatkan kesehatan Masyarakat melalui obat dan makanan aman.
3. Penanganan pengaduan Masyarakat yang telah dikelola dengan baik dengan diraihnya Piala Anggakara Birawa (TOP 10) sebagai bentuk penghargaan dalam penanganan pengaduan pelayanan publik terbaik yang diberikan oleh Kementerian PANRB.
 4. Kemudahan akses bagi Masyarakat dalam memperoleh informasi terkait BPOM yang merupakan bentuk implementasi keterbukaan informasi publik melalui berbagai media informasi termasuk *website* telah dinilai cukup baik dengan diperolehnya penilaian hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi BPOM dengan predikat "Menuju Informatif" yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat.

Upaya peningkatan terhadap keberhasilan indikator tersebut di atas yang dapat dilakukan oleh BPOM antara lain:

1. Memberikan informasi yang jelas dan cepat kepada Masyarakat dalam bentuk siaran *pers*, *public warning*, artikel, tayangan video, infografis, dll. melalui berbagai media penyebaran informasi yang mudah dijangkau Masyarakat seperti media sosial maupun *link* resmi lain yang mudah diakses terutama apabila terdapat pemberitaan yang meresahkan Masyarakat tentang Obat dan Makanan yang beredar, karena informasi resmi dari lembaga Pemerintah dapat menenangkan Masyarakat.

2. Meningkatkan terus kegiatan KIE kepada Masyarakat melalui berbagai kegiatan baik langsung maupun melalui berbagai media. KIE diperlukan dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan Masyarakat untuk menghindari produk ilegal dan/atau palsu termasuk yang dijual di sarana tidak resmi dan penjualan secara *online*.
3. Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dengan melibatkan Masyarakat secara aktif dalam berbagai kegiatan KIE obat dan makanan sehingga BPOM semakin dekat dengan Masyarakat.
4. Meningkatkan kecepatan layanan dalam permintaan informasi dan penanganan pengaduan Masyarakat serta menginformasikan hasil tindak lanjut yang dilakukan BPOM terhadap laporan Masyarakat.

Sasaran 5	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama
IKU <i>Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama dukungan manajemen</i>	

Keberhasilan pencapaian sasaran kelima ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 10. Pencapaian Sasaran Kelima Tahun 2018

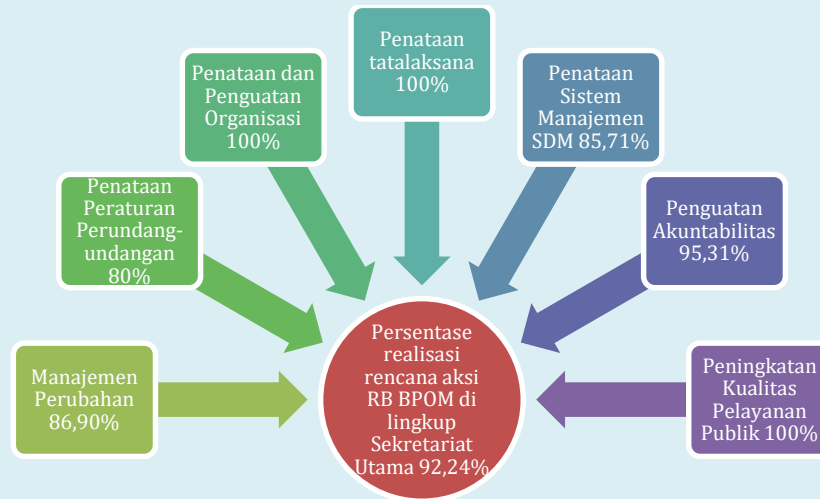
No	Indikator	2019	2018				2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama dukungan manajemen	100	100	92,24	92,24	92,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja yang pertama adalah “Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama” adalah 92,24 dari target 100, sehingga capaian indikator adalah 92,24%.

Rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama merupakan rencana aksi program Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdapat pada

roadmap RB 2015-2019 berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2015-2019.

Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama dihitung dengan membandingkan Jumlah rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama yang terlaksana dengan Jumlah rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama pada tahun berjalan.



Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama tidak mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 92,24%, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena:

1. Manajemen Perubahan: belum tercapainya pada Evaluasi Implementasi Budaya Organisasi PIKKIR, Penetapan dan Pelaksanaan *Quick Wins* BPOM, Pelaksanaan *Survey Engagement* dan Tindak Lanjut Hasil *Survey Engagement*.
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan: pertemuan konsultasi dalam setiap proses penyusunan peraturan belum dilakukan secara optimal.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: Kebutuhan SDM BPOM ditetapkan dengan menyusun analisa beban kerja untuk masing-masing fungsi yang dilaksanakan. Setiap tahun BPOM memperbaharui analisa beban kerja sesuai dengan perubahan lingkungan strategis. Pemenuhan kebutuhan SDM masih jauh dari ideal.
4. Penguatan Akuntabilitas: Target dan metode pengukuran untuk indikator level 1 s.d. 4 masih belum final, sehingga pemanfaatan *e-performance* BPOM belum optimal. Serta evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja BPOM belum optimal, saat ini sedang dilakukan revisi Pedoman Evaluasi AKIP.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian target adalah:

1. Manajemen Perubahan
 - Pembentukan Agen Perubahan BPOM melalui Keputusan Kepala BPOM No.HK.04.2.82.02.18.1101 Tahun 2018 tentang Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPOM.
 - Pelatihan Revolusi Mental bagi Agen Perubahan BPOM sebagai bentuk dari implementasi Instruksi Presiden No.12 tahun 2016.
 - *Workshop* Agen Perubahan BPOM.
 - Penetapan dan Pelaksanaan *Quick Wins* BPOM yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.82.02.18.0922 tentang Penetapan *Quick Wins* BPOM Tahun 2018.
 - Melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM.
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

BPOM telah melaksanakan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian besar peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron. Identifikasi dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. BPOM memiliki sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/*Policy Paper*, dan Paraf Koordinasi.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penyusunan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM dan Penyusunan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM (dasar pembentukan 40 Loka POM di Kabupaten/Kota) dan evaluasi kelembagaan BPOM berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018.
4. Penataan tatalaksana

Penyusunan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.223.06.18.3195 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) ISO 9001:2015 BPOM (memuat peta proses bisnis, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi, dan daftar rekapitulasi SOP Makro BPOM) serta Sertifikasi ISO 9001:2015 atas BPOM sebagai entitas lembaga, 28 (dua puluh delapan) unit kerja pusat, dan 32 (tiga puluh dua) UPT Balai Besar/Balai POM.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Telah ada *roadmap* strategi pengelolaan SDM tahun 2018-2024, dimana selama tahun 2018 dalam proses penyempurnaan dan pembangunan. Diharapkan pada tahun 2019 akan implementasi dan Pelaksanaan monitoring evaluasi

- Telah ada roadmap engagement pegawai dimana hal ini merupakan tindak lanjut dari hasil survey opini pegawai yang diisi oleh seluruh pegawai BPOM
 - Telah ada arsitektur siasn dan *roadmap* penyempurnaan siasn
6. Penguatan Akuntabilitas :
- Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan tahunan
 - Dilakukan pembahasan peta strategi, target dan definisi operasional level BPOM s.d eselon 4 sesuai OTK baru
 - Penyusunan Renstra, Renja dan PK sesuai OTK baru
 - Mengembangkan manajemen kinerja, dengan mengembangkan *e-performance* sesuai dengan OTK baru yang diintegrasikan dengan e-SKP dan anggaran, sehingga tergambar anggaran berbasis kinerja, (dengan menggunakan jasa konsultan).
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : Melaksanakan kebijakan survei kepuasan Masyarakat secara berkala, Evaluasi kebijakan survei kepuasan Masyarakat secara berkala, Tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi survei kepuasan Masyarakat secara berkala, Hasil survei terintegrasi dalam *subsite* RB BPOM, Penyempurnaan media pengaduan pelayanan, Monev Integrasi media pengaduan pelayanan publik *online*.

Upaya Peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan indikator tersebut di atas adalah

1. **Penataan Manajemen Perubahan:** (1). menindaklanjuti hasil pemetaan adanya resistensi ASN sebesar 8,73% terhadap perubahan/Program Reformasi Birokrasi, (2). Setiap agen perubahan harus membuat rencana tindak berdasarkan nilai organisasi, perubahan apa yang ingin dicapai dan rencana tindak lanjutnya.
2. **Penataan Peraturan Perundang-undangan:** pengkajian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan, pelaksanaan konsultasi publik, simplifikasi regulasi (pencabutan, revisi/perubahan), dan pengembangan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan serta peningkatan kompetensi SDM penyusunan peraturan perundang-undangan.
3. **Penataan dan Penguatan Organisasi:** pembangunan instrumen evaluasi kelembagaan berbasis elektronik.
4. **Tatalaksana:** integrasi sistem mutu BPOM berdasarkan ISO 9001:2015 dengan ISO/IEC 17025:2017 dan mengembangkan inovasi *e-government* dan dalam upaya peningkatan dan kemudahan layanan sesuai tugas fungsi organisasi, dan meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

5. **Penataan Sistem Manajemen SDM:** Implementasi terhadap roadmap strategi pengelolaan SDM seperti mengintegrasikan penilaian prestasi kerja pegawai, peraturan-peraturan mengenai *reward* dan *punishment* dengan data absensi/fingerprint pegawai sehingga tunjangan kinerja pegawai lebih terukur, *reliable* dan *valid*.
6. **Penguatan Akuntabilitas:** Rumusan hasil dan ukuran kinerja perlu dilakukan analisis hubungan/turunan kinerja pada level yang ada dibawahnya sampai ke unit kerja terkecil, bahkan sampai ke level individu (*Cascading*), serta dilengkapi dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).
7. **Pelayanan Publik:** (1). Mengembangkan berbagai jenis pelatihan dalam meningkatkan nilai-nilai budaya pelayanan prima, dan mengimplementasikan sistem reward dan punishment, guna memberikan motivasi bagi pemberi dan pengguna layanan, (2). Mengembangkan survei eksternal pada setiap jenis pelayanan, menindaklanjuti hasil survei yang difokuskan pada unsur yang mendapat nilai lebih rendah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Sasaran 6	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu
IKU <i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu</i>	

Keberhasilan pencapaian sasaran keenam ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 11. Pencapaian Sasaran Keenam Tahun 2018

No	Indikator	2019	2018				2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	-	100	-	-	100	-	-	100	-

Indikator kinerja yang pertama adalah “Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu” adalah 100 dari target 100, sehingga capaian indikator adalah 100%.

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu merupakan dokumen yang meliputi: 1) Renstra BPOM/ Review Renstra/ Kajian Lingkungan Strategis, 2) Renja BPOM tahun n+1, 3) Perjanjian Kinerja BPOM tahun n, 4) Laporan Kinerja BPOM tahun n-1, 5) Laptah BPOM n-1, 6) Perjanjian kinerja Sektama Tahun n, 7) Lapkin sektama tahun n -1, 8) DIPA BPOM tahun n+1/ POK tahun n+1, 9) Laporan Keuangan BPOM tahun n-1, 10) Laporan keuangan BPOM semester 1 tahun n, 11) Laporan Keuangan Sektama tahun n-1 dan 12) Laporan keuangan Sektama semester 1 tahun n yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku atau berdasarkan oleh *deadline* yang diberikan oleh suprasistem terkait.

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan membandingkan Jumlah dokumen yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah dokumen yang dihasilkan.

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 100%, sama jika dibandingkan pada tahun 2017 dengan capaian 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian target adalah:

1. Penyusunan Revisi Renstra BPOM 2015-2019.
2. Penyusunan rancangan teknokratik Renstra 2020-2024.
3. Pertemuan penyusunan perencanaan tahunan.
4. Sosialisasi dan Bimtek penyusunan RKAKL pagu anggaran
5. Sosialisasi dan Bimtek RKAKL alokasi anggaran.
6. Pertemuan penyusunan RKAKL revisi TA 2018 OTK baru BPOM.
7. Diseminasi kebijakan baru perencanaan dan penganggaran pusat dan UPT Balai
8. Penyusunan standar biaya keluaran (SBK) dengan *stakeholder*.
9. Koordinasi penganggaran dengan lintas sektor.
10. Pertemuan rekonsiliasi hibah/penganggaran dengan *stakeholder*.

11. Monitoring kegiatan PNBP di Balai POM dalam rangka penyusunan program PNBP 2019.
12. Membangun aplikasi penatausahaan dan pelaporan PNBP
13. Membangun *web* servis untuk penarikan data EPA seluruh BPOM dari aplikasi OMSPAN
14. Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
15. Melaksanakan FGD dalam rangka Penyusunan Laporan keuangan BPOM.
16. Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan tingkat Satker Sekretariat Utama dan BPOM.
17. Meningkatkan kompetensi petugas pengelola data dalam melakukan *entry data* pada aplikasi *monev online* serta melakukan laporan kinerja melalui Sosialisasi Bimtek SAKIP dan *Monev Online*.
18. Melakukan pendampingan/ asistensi ke unit kerja dalam menyusun dokumen perencanaan, dokumen monitoring dan evaluasi serta dokumen laporan kinerja.
19. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama, dan Laporan Kinerja BPOM.

Untuk mempertahankan capaian indikator agar tetap memperoleh kategori Baik, maka upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2019 antara lain:

1. Mengembangkan dan mengimplementasikan *e-planning*
2. Menyusun Rencana Strategis 2020-2024
3. mengembangkan aplikasi *e-budgeting*
4. penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk output baru karena adanya penyesuaian OTK Baru.
5. Mengembangkan *e-performance* yang terintegrasi
6. Mengintegrasikan aplikasi penatausahaan dan pelaporan PNBP dengan aplikasi *web form* dan *e-payment*

Sasaran 7	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen
IKU 1. Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik 2. Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	

Keberhasilan pencapaian sasaran ketujuh ini diukur dengan 2 (dua) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 12. Pencapaian Sasaran Ketujuh Tahun 2018

No	Indikator	2019	2018				2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	89	87	81,4	93,56	91,46	100	100	100			-	-	-	-
2	Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	85	84	86	102,38	101,18	82	98,40	120						

Indikator kinerja yang pertama adalah “**Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik**” adalah 81,4 dari target 87, sehingga capaian indikator adalah 93,5%.

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Satker dinilai mampu mengelola BMN dengan baik apabila dapat melaksanakan seluruh aspek pengelolaan BMN meliputi: Pemusnahan Barang, Penghapusan Barang Usang/Rusak, dan Penetapan Status Penggunaan termasuk kepatuhan pelaporan BPOM dan Sertifikasi aset sesuai ketentuan dengan nilai minimal 60 (enam puluh).

Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik dihitung dengan membandingkan Jumlah satker yang mengelola BMN dengan baik dengan jumlah satker di BPOM.

Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik tidak mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 81,4% dari target 87% atau mencapai 93,5%. Realisasi ini berdasarkan nilai pengelolaan BMN dengan *range* nilai baik yaitu 60-100, dimana terdapat 37 satker yang bernilai baik dari 43 satker yang ada. Hal ini dipengaruhi karena kurang

maksimalnya koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal dalam melaksanakan pengelolaan BMN baik secara langsung dan tidak langsung atau menggunakan media dan teknologi yang tersedia sebagai sumber daya komunikasi.

Selama tahun 2018, BPOM telah melaksanakan berbagai proses pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN di seluruh Satker di BPOM.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah Komitmen dari seluruh unsur pimpinan dan pengelola BMN untuk mengelola BMN dengan baik.

Upaya Peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan indikator tersebut di atas adalah dilakukan Peningkatan kemampuan SDM khususnya Pengelola BMN serta memberikan *reward* dan *punishment* terhadap Satker Pengguna BMN, serta dilakukan intensifikasi pembinaan terhadap pengelola BMN pada satker BPOM dan melaksanakan inventarisasi BMN pada satker secara bersama.

Indikator kinerja yang kedua adalah “**Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja ber kriteria minimal baik**” adalah 86% dari target 84%, sehingga capaian indikator adalah 102,4%.

SDM BPOM yang memiliki kinerja ber kriteria minimal baik merupakan penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistemprestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja ber kriteria minimal baik dihitung berdasarkan penilaian prestasi kerja individu minimal 76 yang dihitung dari capaian sasaran kinerja pegawai (60%) dan penilaian perilaku (40%).

Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja ber kriteria minimal baik melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 86%, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2017

dengan capaian 102,4%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

1. Mengelola pendampingan Implementasi manajemen kinerja SDM
2. Melakukan monitoring penyusunan SKP dan penilaian 3 bulanan melalui aplikasi e-SKP
3. Mengkoordinir pendampingan penilaian prestasi kerja pada unit kerja

Upaya Peningkatan terhadap keberhasilan indikator tersebut di atas Tunjangan kinerja pegawai berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja per triwulan, bukan per tahun lagi. Maka setiap pegawai akan lebih tertib dalam pengisian e-SKP.

Sasaran 8	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran
IKU <i>Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi</i>	

Keberhasilan pencapaian sasaran kedelapan ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 13. Pencapaian Sasaran Kedelapan Tahun 2018

No	Indikator	2019	2018				2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana merupakan rekomendasi hasil evaluasi program penataan dan penguatan organisasi serta program penataan tata laksana yang diberikan kepada BPOM oleh Kementerian PANRB, BPK, KPK, dan/atau lembaga sertifikasi ISO 9001 2001:2015. **Indikator kinerja** “rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi” dihitung dengan membandingkan jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi.

Target rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana yang diukur berdasarkan indikator ini dapat direalisasikan 100% sesuai target sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase capaian target adalah 100%. Pengukuran kinerja menggunakan indikator ini mulai ditetapkan tahun 2018.

Capaian 100% dipengaruhi oleh tindak lanjut yang dilakukan BPOM atas 2 (dua) rekomendasi dari Kementerian PANRB yang merupakan 2 (dua) output dari kegiatan penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana sebagai berikut:

1. Peta proses bisnis BPOM mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
2. Laporan hasil evaluasi kelembagaan BPOM mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Berkaitan dengan kegiatan penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana, pada tahun 2018 BPOM telah melaksanakan:

1. Penyusunan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM;
2. Penyusunan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM (dasar pembentukan 40 Loka POM di Kabupaten/Kota);
3. Penyusunan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.223.06.18.3195 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) ISO 9001:2015 BPOM (memuat peta proses bisnis, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi, dan daftar rekapitulasi SOP Makro BPOM);
4. Sertifikasi ISO 9001:2015 atas BPOM sebagai entitas lembaga, 28 (dua puluh delapan) unit kerja pusat, dan 32 (tiga puluh dua) UPT Balai Besar/Balai POM.

Kegiatan-kegiatan tersebut menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran”.

Upaya peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan pencapaian indikator dilakukan melalui pembangunan instrumen evaluasi kelembagaan berbasis elektronik dan integrasi sistem mutu BPOM berdasarkan ISO 9001:2015 dengan ISO/IEC 17025:2017.

Sasaran 9	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum
IKU	
1. <i>Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun</i>	
2. <i>Persentase advokasi hukum yang diselesaikan</i>	

Keberhasilan pencapaian sasaran kesembilan ini diukur dengan 2 (dua) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 14. Pencapaian Sasaran Kesembilan Tahun 2018

No	Indikator	2019	2018				2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	100	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-
2	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100	100	100	100	100		100							

Indikator kinerja yang pertama adalah “**Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun**” adalah 100 dari target 100, sehingga capaian indikator adalah 100%.

Rancangan peraturan perundang-undangan meliputi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan BPOM, Rancangan Keputusan Kepala BPOM (yang bersifat mengatur), Naskah Perjanjian Kerja Sama.

Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun dapat dihitung dengan membandingkan perundangan-undangan yang selesai disusun terhadap rancangan perundang-undangan yang diterima.

Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 100%. Selama tahun 2018, BPOM telah melakukan penyusunan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang, 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah, 34 (tiga

puluh empat) Peraturan BPOM, 72 (tujuh puluh dua) Keputusan Kepala BPOM, dan 110 (seratus sepuluh) Naskah Perjanjian Kerja Sama.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah BPOM telah melaksanakan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian besar peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron. Identifikasi dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. BPOM memiliki sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/*Policy Paper*, dan Paraf Koordinasi.

Upaya peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan pencapaian indikator dilakukan melalui pengkajian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan, pelaksanaan konsultasi publik, simplifikasi regulasi (pencabutan, revisi/perubahan), dan pengembangan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan serta peningkatan kompetensi SDM penyusunan peraturan perundang-undangan.

Indikator kinerja yang kedua adalah “**Persentase advokasi hukum yang diselesaikan**” adalah 100 dari target 100, sehingga capaian indikator adalah 100%.

Permintaan Advokasi Hukum terkait dengan Pemberian Pertimbangan Hukum, Penanganan Perkara/Kasus Hukum, Fasilitasi dan Pendampingan Saksi/Ahli, Konsultasi Hukum dan Penyuluhan Hukum.

Persentase advokasi hukum yang diselesaikan dapat dihitung dengan membandingkan jumlah layanan advokasi yang ditindaklanjuti terhadap jumlah permintaan advokasi yang diterima.

Persentase Advokasi Hukum yang diselesaikan mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 103,3%. Selama tahun 2018, BPOM telah melakukan 103 (seratus tiga) Layanan Pertimbangan Hukum, 101 (seratus satu) Layanan Penanganan Perkara, dan 105 (seratus lima) Layanan Penyuluhan Hukum.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah BPOM telah melakukan pertimbangan hukum terkait permasalahan pengawasan di bidang obat dan makanan, penanganan perkara/biaya penyelesaian perkara, pemberian advokasi hukum

dan penyuluhan hukum serta koordinasi pelaksanaan penanganan perkara/gugatan hukum BPOM.

Upaya peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dilakukan melalui pembangunan aplikasi penunjukan saksi/ahli (SIKOFI-OM) dan peningkatan kompetensi SDM dalam penanganan perkara.

Sasaran 10	Meningkatnya kerja sama BPOM
IKU <i>Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM</i>	

Keberhasilan pencapaian sasaran kesepuluh ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 15. Pencapaian Sasaran Kesepuluh Tahun 2018

No	Indikator	2019	2018				2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	71	70	70	100	98,59	-	67	-	-	66	-	-	63	-

Indikator kinerja yang pertama adalah “Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM” adalah 70 dari target 70 sehingga capaian indikator adalah 100%.

Kerja sama yang dimaksud meliputi penajakan kerja sama, penyusunan kesepakatan kerja sama, serta pelaksanaan kerja sama BPOM dengan mitra baik dalam negeri dan luar negeri. Kerja sama dalam negeri dilakukan melalui kemitraan dengan lintas sektor terkait antara lain kerja sama dengan kementerian/lembaga, akademisi, organisasi Masyarakat, asosiasi pelaku usaha, gerakan pramukan, dll. Kerja sama luar negeri dilaksanakan

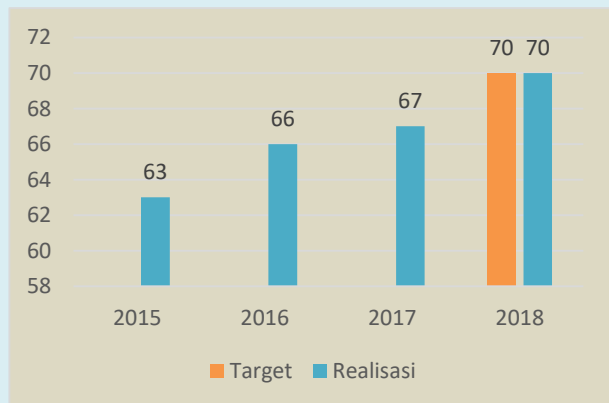
meliputi kerja sama dengan mitra luar negeri secara bilateral, maupun dalam forum regional, dan multilateral.

Dukungan manajemen Sekretariat Utama dalam **“Meningkatnya Kerja Sama BPOM”** melalui fasilitasi dan koordinasi kerja sama BPOM yang dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama, berupa pelaksanaan kegiatan *capacity building* (workshop, seminar, desiminasi, *sharing experience/knowledge*, dll), kegiatan bersama (*joint inspection, joint assessment*, dll), penyusunan naskah dan dokumen kerja sama, rapat koordinasi, dll.

Jumlah kerja sama diukur berdasarkan capaian penyusunan naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan pihak mitra di dalam negeri dan luar negeri, posisi BPOM/Indonesia dalam forum kerja sama internasional, penyiapan bahan kerja sama, dll. Sedangkan efektivitas kerja sama diukur berdasarkan jumlah kerja sama yang telah diimplementasikan minimal 1 ruang lingkup.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM.

Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 70%, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2017 dengan capaian 67% secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena:



1. Meningkatnya koordinasi internal dan eksternal.
2. Sistem manajemen mutu BPOM yang telah diimplementasikan dengan baik.
3. Tersedianya panduan penyiapan bahan kerja sama dan penyusunan perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri.
4. Meningkatnya permintaan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan masing-masing negara dan dengan lintas sektor terkait di dalam negeri.

Selama tahun 2018, BPOM telah melakukan kerja sama sebanyak 91 kerja sama yang terdiri dari:

1. Kerja Sama Bilateral dan KSST sebanyak 14 (empat belas) kerja sama yang meliputi di 14 (empat belas) negara yaitu: Amerika Serikat, Australia, Cina, India, Korea, Arab Saudi, Jepang, Ukraina, Kazakhstan, EFTA, Palestina, Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL), Maroko dan Tunisia. dengan 14 (empat belas) instansi yaitu US Food and Drug Administration (FDA), US Pharmacopeia, Harvard Kennedy School (HKS), Michigan State University (MSU), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Therapeutic Good Administration (TGA), General Administration of Custom of the PRC, State Administration of Traditional Chinese Medicine (SATCM), Guangzhou Hospital of Traditional Chinese Medicine (TCM), Food and Health Bureau of Hong Kong Special Administrative Region, Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), Ministry of AYUSH, Ministry Food and Drug Safety (MFDS), Saudi Food and Drug Administration (SFDA), Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), Japan International Cooperation Agency (JICA), State Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control (SSUMDC), National Center for Expertise of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment (NCEMMDME).
2. Kerja Sama Regional Multilateral sebanyak 20 (dua puluh) dokumen kerja sama yang meliputi kerja sama pada forum (Senior Economic Official Meeting) SEOM, Cluster 4, ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality-Traditional Medicine and Health Supplement Product Working Group (ACCSQ TMHS PWG), ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality-Prepared Foodstuff Product Working Group (ACCSQ PFPWG, ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality-Pharmaceutical Product Working Group (ACCSQ PPWG), ASEAN - China, ASEAN - Australia New Zealand, ASEAN - Korea, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Commission on Narcotic Drugs (CND), Member State Mechanism on Substandard and Falsified Medical Product (MSM SFMP), CODEX, International Coalition on Medicines Regulatory Authorities (ICMRA), International Conference on Drug Regulatory Authorities (ICDRA), Technical Barriers to Trade- World Trade Organization (TBT WTO), Sanitary and Phytosanitary World Trade Organization (SPS WTO), Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPS WTO), WTO (Trade and Facilitation Agreement (TFA), Organization of Islamic Cooperation (OIC).

3. Kerja Sama Dalam Negeri sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kerja sama yang meliputi 41 kerja sama dengan instansi Pemerintah dan 16 dengan mitra non Pemerintah. Kerja Sama dengan instansi Pemerintah meliputi kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota serta perangkat daerah lainnya. Kerja Sama dengan mitra non pemerintah meliputi akademisi, asosiasi, organisasi Masyarakat dan gerakan pramuka (Lampiran 7).

Upaya Peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan indikator tersebut di atas antara lain melakukan:

1. Pengembangan aplikasi *database* internal untuk memonitor progres layanan Biro Kerja Sama.
2. Peningkatan kompetensi SDM Biro Kerja Sama.
3. Sosialisasi pedoman dan *roadmap* kerja sama kepada unit kerja dan lintas sektor terkait.
4. Peningkatan koordinasi penyiapan bahan kunjungan kerja luar negeri dan dokumen posisi BPOM/Indonesia dalam forum bilateral, regional dan multilateral.

Sasaran 11	Menguatnya pengelolaan hubungan Masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen
<p>IKU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM</i> 2. <i>Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1</i> 3. <i>Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung</i> 	

Keberhasilan pencapaian sasaran kesebelas ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 16. Pencapaian Sasaran Kesebelas Tahun 2018

No	Indikator	2019	2018				2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	87	85	99,3	116,82	114,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1	65	60	77,05	128,42	118,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	93	92	96,2	104,57	103,44		92			92			92	

Indikator kinerja yang pertama adalah “Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM” adalah 99,3% dari target 85%, sehingga capaian indikator adalah 116,82 %.

Pemberitaan positif adalah pemberitaan mengenai BPOM di berbagai media baik media cetak, media elektronik, maupun media online dengan kategori berita *tone* netral (jika isi berita hanya menyebutkan nama BPOM) dan *tone* positif (jika ada pernyataan apresiasi kinerja atau dukungan kepada BPOM dari pihak lain).

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pemberitaan dengan *tone* netral dan positif dibandingkan keseluruhan pemberitaan tentang BPOM.

Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM di tahun 2018 mencapai target yang ditentukan. Hal ini secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. BPOM semakin cepat tanggap terhadap beredarnya isu tentang obat dan makanan yang meresahkan Masyarakat antara lain melalui klarifikasi, penjelasan berita maupun siaran pers yang dipublikasikan melalui berbagai media.
2. BPOM semakin cepat dalam merespon permintaan wawancara dan narasumber dari media.
3. BPOM semakin sering melibatkan media dalam kegiatan-kegiatan pengawasan obat dan makanan, terutama yang berkaitan langsung dengan Masyarakat.

Selama tahun 2018 BPOM telah melakukan berbagai kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini yaitu:

1. Membangun hubungan baik dengan media melalui pemenuhan permohonan wawancara dan *talkshow* secara tepat waktu, media *briefing*, media *gathering*, maupun media visit.
2. Memberikan informasi kepada media tentang pengawasan Obat dan Makanan secara umum, maupun penjelasan terhadap isu Obat dan Makanan secara khusus melalui konferensi *pers* maupun *doorstop*.
3. Melibatkan media dalam berbagai kegiatan strategis BPOM baik di pusat maupun di daerah.
4. Mengirimkan dokumentasi hasil liputan kegiatan maupun materi pendukungnya kepada media yang tidak hadir pada saat kegiatan dilaksanakan.

Upaya peningkatan terhadap keberhasilan indikator tersebut di atas yang dapat dilakukan oleh BPOM antara lain:

1. Pengembangan aplikasi kehumasan berbasis web untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan informasi kepada media.
2. Membuat komunitas media untuk meningkatkan engagement antara BPOM dan media
3. Meningkatkan keterlibatan media dalam berbagai kegiatan strategis BPOM.
4. Peningkatan kompetensi SDM dalam menghasilkan dokumentasi kegiatan baik berupa foto maupun video sesuai kaidah jurnalistik.

Indikator kinerja yang kedua adalah “Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1” dengan indeks target 60. Indikator ini dapat dihitung berdasarkan survei kepada perwakilan unit kerja di BPOM yang melaksanakan kegiatan yang dihadiri oleh Kepala BPOM. Dari survei tersebut diperoleh indeks dengan nilai 77,05 atau 128,42% dari target.

Koordinasi dalam rangka layanan dukungan manajemen eselon I adalah interaksi dan komunikasi Biro Humas dan DSP dengan unit kerja di BPOM dalam rangka mengoordinasikan layanan manajemen kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kerja dan dihadiri oleh Kepala BPOM. Layanan dukungan manajemen tersebut meliputi layanan terkait kesekretariatan dan penjadwalan, keprotokolan, materi substansi untuk Kepala BPOM, dan kehumasan (peliputan dan pemberitaan).

Indeks keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan manajemen eselon I dinyatakan dalam skala 0-100. Indeks dihitung dengan mengalikan rata-rata penilaian unit kerja

(skala nilai 1 hingga 4), terhadap koordinasi yang dilakukan oleh Biro Humas dan DSP dengan unit kerja, dengan faktor 25.

Faktor yang berkontribusi pada capaian target tersebut adalah spesialisasi unit eselon III tersendiri dalam fungsi protokol dan kesekretariatan pimpinan serta fungsi dukungan strategis pimpinan meningkatkan jalur koordinasi antara Biro Humas dan DSP dengan unit kerja dalam hal teknis keprotokolan dan pengaturan acara pimpinan dengan penyediaan bahan substansi pada kegiatan Kepala BPOM.

Kegiatan yang dilakukan oleh Biro Humas dan DSP dalam pencapaian target dimaksud meliputi:

- a. Sosialisasi SOP makro POM-01.03/CFM.01/SOP.01 tentang Ketersediaan Dokumen Substansi Teknis Pimpinan dan POM-08.01/CFM.01/SOP.01 tentang Keprotokolan.
- b. Pertemuan dan komunikasi dengan unit terkait persiapan penyelenggaraan kegiatan pimpinan.

Upaya ke depan yang akan dilakukan oleh Biro Humas dan DSP dalam meningkatkan nilai keberhasilan koordinasi dalam dukungan manajemen eselon I adalah peningkatan komunikasi dengan unit teknis penyelenggara kegiatan yang mengundang Kepala BPOM serta penyelenggaraan pertemuan evaluasi rutin untuk menjangkau umpan balik dan masukan dari unit teknis dalam meningkatkan koordinasi layanan tersebut.

Indikator kinerja yang ketiga adalah “Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung” dengan capaian 96,2% dari target 92, sehingga capaian indikator adalah 104,57%.

Layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung merupakan layanan pengaduan dan informasi Masyarakat yang dapat langsung dijawab atau diselesaikan oleh petugas layanan berdasarkan referensi yang telah tersedia tanpa perlu melakukan proses rujukan. Capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber informasi yang lengkap, jelas dan terkini bagi petugas layanan saat memberikan layanan.

Indikator ini dapat dihitung dengan membandingkan jumlah laporan layanan pengaduan dan informasi Masyarakat yang dijawab langsung terhadap data jumlah seluruh layanan.

Indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2018 untuk mengukur kinerja layanan informasi dan pengaduan Masyarakat.

Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 104,57%, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Dilakukan upaya perbaikan layanan dengan mengembangkan berbagai inovasi yang dapat menunjang kecepatan petugas dalam menjawab permintaan informasi maupun pengaduan Masyarakat yaitu pengembangan *Aplikasi Knowledge Base Contact Center (KBCC)*, yaitu aplikasi standar jawaban yang digunakan sebagai acuan bagi petugas dalam memberikan layanan.
2. Peningkatan kompetensi petugas layanan melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan sosialisasi yang bersifat substantif dan keterpaparan terhadap berbagai isu terkini terkait obat dan makanan.

Selama tahun 2018, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

1. Pengembangan Aplikasi *Knowledge Base Contact Center (KBCC)* berbasis *web* yang dapat diakses oleh petugas ULPK di seluruh Indonesia.
2. Penyusunan materi *knowledge base contact center*.
3. Diseminasi pengelolaan informasi dan pengaduan Masyarakat tahun 2018 sebagai bentuk peningkatan kompetensi petugas layanan termasuk sosialisasi pemanfaatan aplikasi *knowledge base contact center* bagi petugas layanan di seluruh Indonesia.
4. Pelaksanaan peningkatan kompetensi petugas layanan.

Upaya peningkatan terhadap keberhasilan indikator tersebut di atas yaitu:

1. Pelaksanaan *knowledge sharing forum* bagi petugas layanan dengan menghadirkan narasumber dari unit kerja di BPOM untuk *sharing* program/kegiatan, isu dan layanan publik terbaru untuk dapat memenuhi aspek keterbaharuan sumber informasi layanan.
2. *Updating* informasi pada aplikasi *knowledge base contact center* secara berkala sehingga dapat menjadi sumber informasi yang lengkap dan terkini bagi petugas.
3. Peningkatan kompetensi petugas layanan melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan sosialisasi yang bersifat substantif dan keterpaparan terhadap berbagai isu terkini terkait obat dan makanan.

Sasaran 12	Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019
IKU <i>Nilai AKIP Sekretariat Utama</i>	

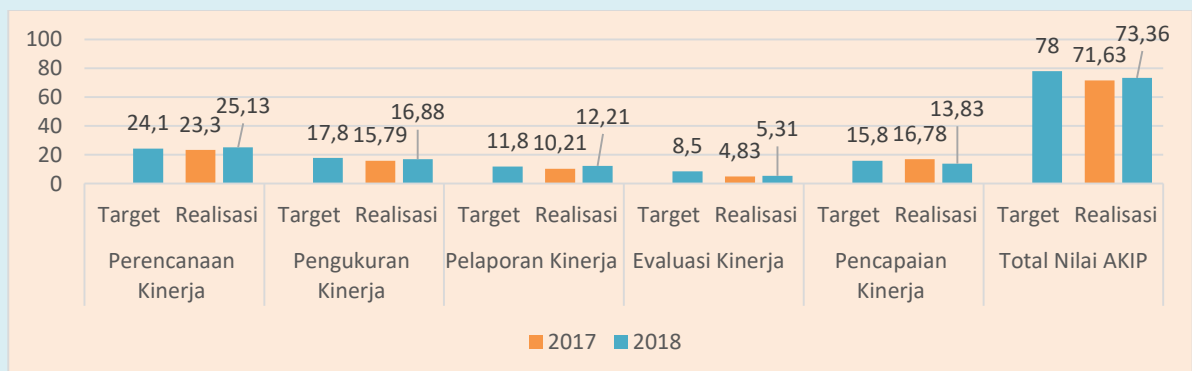
Keberhasilan pencapaian sasaran keduabelas ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 17. Pencapaian Sasaran Keduabelas Tahun 2018

No	Indikator	2019	2018				2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Nilai AKIP Sekretariat Utama	81	78	73,36	94,05	90,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja yang pertama adalah “Nilai AKIP Sekretariat Utama” adalah 73,36 dari target 78, sehingga capaian indikator adalah 94,05%.

Nilai AKIP Sekretariat Utama diperoleh berdasarkan nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Sekretariat Utama dengan 5 komponen penilaian yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Kinerja (10%) dan Pencapaian Kinerja (20%).



Nilai AKIP Sekretariat Utama tidak mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 73,36 (94,05%), meningkat jika dibandingkan pada tahun 2017 dengan capaian 71,63. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena:

1. Perencanaan: Sekretariat Utama telah memiliki Dokumen Perencanaan berupa Renstra yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal dan terdapat ukuran kinerja sampai dengan tingkat eselon II sebagai turunan kinerja atasannya, namun Indikator Kinerja Utama yang termuat di Renstra belum cukup untuk merepresentasikan kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Utama.
2. Pengukuran: Sekretariat Utama telah memiliki dan mengembangkan mekanisme yang akan memudahkan pemantauan dan pengukuran kinerja unit kerja secara umum hingga pada tataran individu pegawai melalui aplikasi *e-performance*, namun belum dilaksanakan secara optimal.
3. Pelaporan: Laporan Kinerja Sekretariat Utama telah menyajikan informasi kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, namun informasi capaian kinerja yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
4. Evaluasi Kinerja: Laporan Kinerja Sekretariat Utama telah menyajikan informasi pencapaian kinerja, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, namun evaluasi internal yang dilakukan masih belum memberikan hasil yang maksimal untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja.
5. Capaian Kinerja: Sekretariat Utama telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi terkait peningkatan kinerja pada Laporan Kinerja periode sebelumnya, namun pada tahun 2017 masih terdapat beberapa indikator yang capaiannya masih dibawah target yang telah ditetapkan.

Selama tahun 2018, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

1. Penyusunan Revisi Renstra Sekretariat Utama 2015-2019 sesuai OTK baru.
2. Penyusunan perencanaan tahunan (RKT dan PK).
3. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran Sekretariat Utama.
4. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama.

Upaya peningkatan terhadap keberhasilan indikator tersebut di atas pada tahun 2019 yaitu:

1. Perencanaan: Menyusun penyelarasan Indikator Kinerja Utama pada Renstra sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja baru dengan merepresentasikan kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Utama.

2. Pengukuran: Menyempurnakan penyajian informasi perihal pengukuran kinerja dengan memberi penekanan pada mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur berbasis teknologi informasi.
3. Pelaporan: Memanfaatkan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja untuk perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik pada periode berikutnya.
4. Evaluasi Kinerja: Menyempurnakan penyajian informasi pengukuran kinerja pada dokumen SAKIP dengan memberikan bukti bahwa hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti. Serta memperkuat monitoring periodik termasuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan capaian kinerja, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan.
5. Capaian Kinerja: Terus mendorong penerapan budaya kinerja dengan meningkatkan keselarasan ukuran kinerja dan proses bisnis yang mendasari pencapaian kinerja dengan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk perbaikan capaian tujuan dan sasaran di Lingkungan Sekretariat Utama.

II. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI INSPEKTORAT UTAMA

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 oleh Inspektorat I, Inspektorat Utama, BPOM, ada beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Utama, antara lain:

1. Penetapan Keputusan BPOM tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 2015-2019 yang selaras dengan Renstra Sekretariat Utama dengan Organisasi dan Tata Kerja baru.
2. Pengumpulan dan pengukuran capaian data kinerja dimonitoring dan dievaluasi melalui pertemuan setiap triwulan.
3. Pada tahun 2018, hampir seluruh indikator merupakan indikator baru. Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja tahun 2018 akan dimanfaatkan untuk perbaikan penetapan target tahun berikutnya terutama untuk indikator yang tidak tercapai/melebihi target yang telah ditetapkan.

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2018, pagu anggaran Sekretariat Utama adalah Rp398.836.033.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp326.193.503.684,- **(81,79%)**, dengan rincian:

Tabel 18. Realisasi Keuangan Sekretariat Utama Tahun 2018 Per Program

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya	283.715.033.000	244.342.034.226 (86,12%)
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	115.121.000.000	85.396.108.637 (74,18%)

Realisasi anggaran per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 19. Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Strategis Sekretariat Utama Tahun 2018

Program/Sasaran Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	283.715.033.000	244.342.034.226	86,12%
1. Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	54.715.019.000	48.382.393.457	88,43%
2. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	1.451.731.500	1.337.620.365	92,14%
3. Meningkatnya kepercayaan/opini positif Masyarakat terhadap BPOM	19.302.157.000	14.200.202.637	73,57%
4. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	2.128.841.500	1.842.789.888	86,56%
5. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	7.345.623.000	6.843.120.427	93,16%
6. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	4.306.579.000	3.507.818.529	81,45%
7. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	1.276.759.500	1.201.225.682	94,08%
8. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	3.053.372.000	2.716.060.416	88,95%
9. Meningkatnya kerja sama BPOM	7.713.900.000	6.775.564.685	87,84%
10. Mekuatnya pengelolaan hubungan Masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	14.608.651.500	12.389.011.846	84,81%

Program/Sasaran Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
11. Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	167.812.399.000	145.146.226.295	86,49%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	115.121.000.000	85.396.108.637	74,18%
1. Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	3.950.000.000	3.151.182.271	79,78%
2. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	701.507.000	581.911.895	82,95%
3. Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	110.469.493.000	81.663.014.471	73,92%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran program “Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019” yaitu sebesar 69,77%, hal ini dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang menjalankan fungsi dukungan manajemen, karena didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan gedung dan layanan internal (*overhead*) dan pemeliharaan.

Realisasi terendah terdapat pada sasaran **Meningkatnya kepercayaan/opini positif Masyarakat terhadap BPOM** (73,57%) karena terdapat sisa kegiatan swakelola yang outputnya telah tercapai, misalnya alokasi honor narasumber/pakar, paket *meeting*, perjalanan dinas narasumber, dan honor output kegiatan.

Selain itu dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018, diinstruksikan setiap Kementerian/Lembaga untuk mengambil langkah-langkah efisiensi belanja barang sesuai Inpres No. 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Upaya yang dilakukan agar realisasi anggaran lebih optimal antara lain:

- Menyusun *Plan of Action* (PoA) pada awal tahun anggaran dan dipatuhi pada pelaksanaannya;
- Melakukan monitoring berkala secara lebih ketat atas pencapaian kinerja dan realisasi anggaran kegiatan sesuai sasaran dalam Perjanjian Kinerja;

- c. Menyusun perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya;
- d. Menyusun perencanaan tidak hanya *bussiness as usual*, namun perlu *breakthrough* sehingga *output* dan *outcome* dapat tercapai dengan keterbatasan sumber daya.

IV. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

A. EFISIENSI

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2018, dari 9 kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama, seluruh kegiatan telah efisien. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam Laporan Kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana dan indikator kinerja. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 buku ini.

B. EFEKTIVITAS

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator *outcomes*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survei pengukuran capaian indikator *outcome*.

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB IV

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Secara garis besar, pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Dari 12 (dua belas) sasaran program yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Utama Tahun 2015-2019, 2 sasaran program masuk kategori memuaskan, 4 sasaran program masuk kategori baik, 5 sasaran program masuk kategori cukup, dan 1 sasaran program masuk kategori tidak dapat disimpulkan.
2. 5 (lima) sasaran program masuk kategori cukup yaitu Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019, Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik, Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama, Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM, dan Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Untuk indikator Nilai RB BPOM komponen Penilaian diluar program penguatan pengawasan:
 - Kurangnya pemahaman pegawai akan tugas fungsi dan ukuran keberhasilan tugas
 - Karena internalisasi RB belum secara menyeluruh dan nyata
 - Agen perubahan belum mempunyai target kinerja dan rencana aksi yang terukur
 - Belum menerapkan sistem merit, pola karir belum diterapkan secara transparan, dan jabatan rangkapan struktural karena kosong dalam waktu yang lama.
 - b. Untuk indikator Nilai Pengelolaan BMN BPOM:
 - Belum seragamnya kepedulian Satker-satker terhadap pengelolaan BMN
 - Masih kurangnya sosialisasi terkait peraturan-peraturan terkait pengelolaan BMN baik ditingkat Kuasa pengguna Barang maupun Pengelola BMN yang ada ditiap Satker.

- c. Untuk indikator Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama:
- Manajemen Perubahan: belum tercapainya pada Evaluasi Implementasi Budaya Organisasi PIKKIR, Penetapan dan Pelaksanaan *Quick Wins* BPOM, Pelaksanaan *Survey Engagement* dan Tindak Lanjut Hasil *Survey Engagement*.
 - Penataan Peraturan Perundang-undangan : pertemuan konsultasi dalam setiap proses penyusunan peraturan belum dilakukan secara optimal.
 - Penataan Sistem Manajemen SDM: Kebutuhan SDM BPOM ditetapkan dengan menyusun analisa beban kerja untuk masing-masing fungsi yang dilaksanakan. Setiap tahun BPOM memperbaharui analisa beban kerja sesuai dengan perubahan lingkungan strategis. Pemenuhan kebutuhan SDM masih jauh dari ideal.
 - Penguatan Akuntabilitas: Target dan metode pengukuran untuk indikator level 1 s.d. 4 masih belum final, sehingga pemanfaatan *e-performance* BPOM belum optimal. Serta evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja BPOM belum optimal, saat ini sedang dilakukan revisi Pedoman Evaluasi AKIP.
- d. Untuk indikator Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik, dikarenakan kurang maksimalnya koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal dalam melaksanakan pengelolaan BMN baik secara langsung dan tidak langsung atau menggunakan media dan teknologi yang tersedia sebagai sumber daya komunikasi.
- e. Untuk indikator Nilai AKIP Sekretariat Utama:
- Perencanaan: Indikator Kinerja Utama yang termuat di Renstra belum cukup untuk merepresentasikan kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Utama.
 - Pengukuran: pemantauan dan pengukuran kinerja hingga pada tataran individu pegawai melalui aplikasi *e-performance* belum dilaksanakan secara optimal.
 - Pelaporan: informasi capaian kinerja yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
 - Evaluasi Kinerja: evaluasi internal yang dilakukan masih belum memberikan hasil yang maksimal untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja.
 - Capaian Kinerja: masih terdapat beberapa indikator yang capaiannya masih dibawah target yang telah ditetapkan.

3. 1 (satu) sasaran program masuk kategori tidak dapat disimpulkan yaitu Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen, dikarenakan survei yang dilakukan dari kelima Biro di Sekretariat Utama belum menggunakan metode yang sama dan ada Biro yang jumlah respondennya belum representatif.
4. Dari 9 (sembilan) kegiatan utama, seluruh kegiatan efisien.

II. SARAN

Dari penjelasan di atas, secara umum sasaran strategis Sekretariat Utama telah tercapai. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan, antara lain:

1. Peningkatan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung untuk menunjang kinerja.
2. Peningkatan kemampuan SDM khususnya Pengelola BMN serta memberikan *reward* dan *punishment* terhadap Satker Pengguna BMN, serta dilakukan intensifikasi pembinaan terhadap pengelola BMN pada satker BPOM dan melaksanakan inventarisasi BMN pada satker secara bersama.
3. Tunjangan kinerja pegawai berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja per triwulan.
4. Dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai bahan masukan perencanaan, usulan kebutuhan SDM, maupun kaji ulang bisnis proses dan struktur organisasi.
5. Perencanaan penyusunan regulasi yang mampu mengantisipasi dinamika lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.
6. Dimanfaatkannya aplikasi pemberian keterangan saksi/ahli (SIKOFI-OM).
7. indikator dilakukan dengan analisis hubungan/turunan kinerja pada level yang ada dibawahnya sampai ke unit kerja terkecil, bahkan sampai ke level individu (*Cascading*) untuk rumusan hasil dan ukuran kinerja, serta dilengkapi dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).
8. Pengembangan aplikasi *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-performance* yang terintegrasi.
9. Pengembangan aplikasi kehumasan berbasis web untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan informasi kepada media.
10. Meningkatkan keterlibatan media dalam berbagai kegiatan strategis BPOM.
11. Meningkatkan terus kegiatan KIE kepada Masyarakat melalui berbagai kegiatan baik langsung maupun melalui berbagai media.
12. Meningkatkan kecepatan layanan dalam permintaan informasi dan penanganan pengaduan Masyarakat serta menginformasikan hasil tindak lanjut yang dilakukan BPOM terhadap laporan Masyarakat.
13. Peningkatan koordinasi penyiapan bahan kunjungan kerja luar negeri dan dokumen posisi BPOM/Indonesia dalam forum bilateral, regional dan multilateral.

Halaman ini sengaja dikosongkan



LAMPIRAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN 1

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2015-2019

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM komponen pengungkit diluar program penguatan pengawasan	51,9	54,3
	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP
Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	70	72
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	60	61
Meningkatnya kepercayaan/opini positif Masyarakat terhadap BPOM	Persentase opini positif Masyarakat terhadap BPOM	63	-
	Indeks Opini Publik BPOM	-	65
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	100%	100%
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	87%	89%
	Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	84%	85%
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100%	100%
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100%	100%
	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100%	100%
Meningkatnya kerja sama BPOM	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM	70%	71%
Menguatnya pengelolaan hubungan Masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	85%	87%
	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1	60	61
	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	92%	93%
Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Sekretariat Utama	78	81

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2018




BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Lampiran Keputusan Sekretaris Utama
Nomor HK.04.02.2.21.09.18.4567
Tentang Rencana Kinerja Sekretariat
Utama Badan Pengawas Obat dan
Makanan Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan	51,9
		Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP
2	Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	70
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	60
4	Meningkatnya kepercayaan/opini positif masyarakat terhadap BPOM	Persentase opini positif masyarakat terhadap BPOM	63 %
5	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	100 %
6	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %
7	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	87 %
		Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	84 %
8	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100 %
9	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100 %
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100 %
10	Meningkatnya kerja sama BPOM	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM	70 %
11	Menguatnya pengelolaan hubungan masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	85 %
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1	60
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	92 %
12	Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Sekretariat Utama	78

**PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2018**





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : halobpom@pom.go.id Website : www.pom.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT UTAMA**

NO	PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Customer	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM komponen penilaian diluar program penguatan pengawasan Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	51,9 WTP
2	Customer	Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	70
3	Customer	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	60
4	Customer	Meningkatnya kepercayaan/opini positif masyarakat terhadap BPOM	Persentase opini positif masyarakat terhadap BPOM	63 %
5	Internal Process	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	100 %
6	Internal Process	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %
7	Internal Process	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Persentase Sather yang mampu mengelola BMN dengan baik	87 %
			Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja ber kriteria minimal baik	84 %
8	Internal Process	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100 %
9	Internal Process	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100 %
			Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100 %
10	Internal Process	Meningkatnya kerja sama BPOM	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM	70 %
11	Internal Process	Menguatnya pengelolaan hubungan masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	85 %
			Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon I	60
			Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	92 %
12	Learning & Growth	Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Sekretariat Utama	78

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	Rp 272.404.735.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	Rp 115.121.000.000,-

Pihak Kedua  (Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP)	Jakarta, 7 September 2018 Pihak Pertama  (Dra. Elin Herlina, Apt, MP)
--	--

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				REALISASI				KET	
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12		
	Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah kejian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	0	0	0	1						
4	Peningkatan Kapasitas dan Kapasitas SDM Aparatur BPOM	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3	0,5	1	1,5	2						
		Jumlah dokumen <i>Human Capital Management</i>	1	3	5	7						
		Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	62,75	63,25	64,25	65						
		Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja ber kriteria baik	20	40	60	80						
B	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM											
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	Jumlah dukungan teknis pengadaan barang dan jasa	0	0	3	5						
2	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar	76,5	77,5	79	80						
		Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	25	50	75	100						

Jakarta, Juni 2015
Sekretaris Utama,



Dr. Reri Indriani, Apt., M.Si.
NIP. 19630527 198903 2 001

LAMPIRAN 4

**PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2018**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NPS	KRITERIA	
Customer Perspective									
1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	1	Nilai RB BPOM komponen Penilaian diluar program penguatan pengawasan	-	51,9	51,28	98,81	99,20	Cukup
		2	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	-	WTP	WTP	100,00		
2	Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	3	Nilai Pengelolaan BMN BPOM	-	70	69,18	98,83	98,83	Cukup
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	4	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	-	60	77,36	128,93	128,93	Tidak Dapat Disimpulkan
4	Meningkatnya kepercayaan/opini positif Masyarakat terhadap BPOM	5	Persentase opini positif Masyarakat terhadap BPOM	%	63	66,3	105,24	105,24	Memuaskan
Internal Process Perspective									
5	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	6	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	%	100	92,24	92,24	92,24	Cukup
6	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	7	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100,00	100,00	Baik
7	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	8	Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	%	87	81,4	93,56	99,44	Cukup
		9	Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	%	84	86	102,38		
8	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	10	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	%	100	100	100,00	100,00	Baik

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NPS	KRITERIA
9	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	11	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	%	100	100	100,00	100,00	Baik
		12	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	%	100	100	100,00		
10	Meningkatnya kerja sama BPOM	13	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM	%	70	70	100,00	100,00	Baik
11	Menguatnya pengelolaan hubungan Masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	14	Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM	%	85	99,3	116,82	116,60	Memuaskan
		15	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1	-	60	77,05	128,42		
		16	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung	%	92	96,2	104,57		
Learning and Growth Perspective									
12	Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	17	Nilai AKIP Sekretariat Utama	-	78	73,36	94,05	94,05	Cukup

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2018**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET		
1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM						
		1.1	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	Input:				
				Dana	Rp	2.009.055.000	1.418.311.667	70,60
				Ouput:				
				Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-Undangan	-	2,85	2,71	95,09
		1.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	Input:				
				Dana	Rp	26.995.354.500	24.760.522.802	91,72
				Ouput:				
				Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas		4,62	4,64	100,43
				Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	-	WTP	WTP	100,00
		1.3	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	Input:				
				Dana	Rp	12.525.052.000	12.126.413.227	96,82
				Ouput:				
				Nilai RB BPOM Manajemen Perubahan	-	3,73	3,72	99,73
		1.4	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Input:				
				Dana	Rp	5.339.423.500	4.660.385.736	87,28
				Ouput:				
		Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi	-	4,14	4,01	96,86		

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	
		1.5	Pengelolaan SDM BPOM	Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana	-	4	3,93	98,25	
				Input:					
				Dana	Rp	7.846.134.000	5.416.760.026	69,04	
				Ouput:					
				Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	-	13,15	12,93	98,33	
2	Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM							
		2.1	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	Input:					
				Dana	Rp	3.950.000.000	3.151.182.271	79,78	
				Ouput:					
				Nilai Pengelolaan BMN BPOM	-	70	73,51	105,01	
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM							
		3.1	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	Input:					
				Dana	Rp	1.451.731.500	1.337.620.365	92,14	
				Ouput:					
				Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	-	60	58,87	98,11	
4	Meningkatnya kepercayaan/opini positif Masyarakat terhadap BPOM	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM							
		4.1	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	Input:					
				Dana	Rp	4.161.230.000	3.675.874.079	88,34	
				Ouput:					
				Jumlah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman	KIE	126	133	105,56	

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
		4.2	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Input:				
				Dana	Rp	15.140.927.000	10.524.328.558	69,51
				Ouput:				
				Persentase opini positif Masyarakat terhadap BPOM	%	63	66,3	105,24
5	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM						
		5.1	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	Input:				
				Dana	Rp	2.128.841.500	1.842.789.888	86,56
				Ouput:				
				Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	%	100	92,24	92,24
6	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM						
		6.1	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	Input:				
				Dana	Rp	7.345.623.000	6.843.120.427	93,16
				Ouput:				
				Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	-	75	94,63	126,17
				Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100,00
7	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM						
		7.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	Input:				
				Dana	Rp	701.507.000	581.911.895	82,95

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET			
				Ouput:							
				Persentase Satker yang mengelola BMN dengan Baik		87	100	114,94			
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM									
		7.2		Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM		Input:					
						Dana	Rp	905.748.000	862.606.198	95,24	
						Ouput:					
		7.3		Pengelolaan SDM BPOM		Persentase SDM BPOM yang ditingkatkan kariernya sesuai perencanaan	%	71	70,62	99,46	
						Input:					
						Dana	Rp	3.400.831.000	2.645.212.331	77,78	
		8		Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran		Ouput:					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM											
8.1						Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana		Dana	Rp	1.276.759.500	1.201.225.682
		Input:									
		Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Program Penataan dan Penguatan Organisasi serta Program Penataan Tata Laksana terhadap total rekomendasi	%	100	100			100,00			

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
9	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM						
	9.1	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	Input:					
			Dana	Rp	1.425.081.000	1.324.497.511	92,94	
			Ouput:					
			Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	Rancangan	188	188	100,00	
			Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan	Layanan	129	129	100,00	
	9.2	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Input:					
			Dana	Rp	1.628.291.000	1.391.562.905	85,46	
			Ouput:					
			Persentase permintaan advokasi hukum yang ditindaklanjuti	%	100	103	103,00	
			Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100,00	
10	Meningkatnya kerja sama BPOM	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM						
	10.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan	Input:					
			Dana	Rp	7.713.900.000	6.775.564.685	87,84	
			Ouput:					

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
			dan Kerja Sama Luar Negeri Badan POM	Persentase kerja sama di bidang obat dan makanan yang ditindaklanjuti secara efektif	%	70	70	100,00
				Jumlah kerjasama dan dukungan bantuan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang Obat dan Makanan	Kerjasama	3	3	100,00
11	Menguatnya pengelolaan hubungan Masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM						
		11.1	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	Input:				
				Dana	Rp	2.446.353.000	2.311.305.466	94,48
				Ouput:				
				Layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti	Layanan	17500	22.837	130,50
		11.2	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	Input:				
				Dana	Rp	1.451.731.500	1.337.620.365	92,14
				Ouput:				
				Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	100,00
		11.3	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Input:				
				Dana	Rp	10.710.567.000	8.740.086.015	81,60
				Ouput:				
				Persentase tindak lanjut arahan Pimpinan yang diselesaikan	%	78	65,41	83,86

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
				Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	100,00
12	Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM						
		12.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Badan POM	Input:				
				Dana	Rp	512.000.000	499.000.171	97,46
				Ouput:				
				jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diselesaikan	Paket	1	1	100,00
		12.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	Input:				
				Dana	Rp	2.008.991.000	1.763.106.375	87,76
				Ouput:				
				jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diselesaikan	Paket	1	1	100,00
		12.3	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	Input:				
				Dana	Rp	88.282.237.000	82.786.161.178	93,77
				Ouput:				
				jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diselesaikan	Paket	1	1	100,00
		12.4	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Input:				
Dana	Rp			2.206.909.000	2.030.877.600	92,02		
Ouput:								
		jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diselesaikan	Paket	1	1	100,00		
12.5		Input:						

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
			Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	Dana	Rp	931.800.000	896.388.900	96,20
				Ouput: jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diselesaikan	Paket	1	1	100,00
		12.6	Pengelolaan SDM BPOM	Input: Dana	Rp	73.870.462.000	57.170.692.071	77,39
				Ouput: jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diselesaikan	Paket	1	1	100,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM								
		12.7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	Input: Dana	Rp	85.000.000	85.000.000	100,00
				Ouput: jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diselesaikan	Paket	160	227	141,88
		12.8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	Input: Dana	Rp	110.384.493.000	81.578.014.471	73,90
				Ouput: Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja sesuai Standar	%	88	103,24	117,32

**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2018**

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE		
		INPUT	OUTPUT						
1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	1.1	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	70,60	102,11	1,35	1,00	Efisien	0,35
		1.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	91,72	99,89	1,09	1,00	Efisien	0,09
		1.3	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	96,82	107,77	1,03	1,00	Efisien	0,03
		1.4	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	87,28	106,22	1,12	1,00	Efisien	0,12
		1.5	Pengelolaan SDM BPOM	69,04	100,53	1,42	1,00	Efisien	0,42
2	Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	2.1	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	79,78	105,01	1,32	1,00	Efisien	0,32
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3.1	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	92,14	98,11	1,06	1,00	Efisien	0,06

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE		
		INPUT	OUTPUT						
4	Meningkatnya kepercayaan/opini positif Masyarakat terhadap BPOM	4.1	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	88,34	105,56	1,19	1,00	Efisien	0,19
		4.2	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	69,51	105,24	1,51	1,00	Efisien	0,51
5	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	5.1	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	86,56	92,24	1,07	1,00	Efisien	0,07
6	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	6.1	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	93,16	113,09	1,21	1,00	Efisien	0,21
7	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	7.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	82,95	114,94	1,39	1,00	Efisien	0,39
		7.2	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	95,24	99,46	1,04	1,00	Efisien	0,04
		7.3	Pengelolaan SDM BPOM	77,78	102,38	1,32	1,00	Efisien	0,32
8	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	8.1	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	94,08	100,00	1,06	1,00	Efisien	0,06
9		9.1	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	92,94	100,00	1,08	1,00	Efisien	0,08

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE		
		INPUT	OUTPUT						
	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	9.2	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	85,46	101,50	1,19	1,00	Efisien	0,19
10	Meningkatnya kerja sama BPOM	10.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Badan POM	87,84	100,00	1,14	1,00	Efisien	0,14
11	Menguatnya pengelolaan hubungan Masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	11.1	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	94,48	130,50	1,38	1,00	Efisien	0,38
		11.2	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	92,14	100,00	1,09	1,00	Efisien	0,09
		11.3	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	81,60	91,93	1,13	1,00	Efisien	0,13
12	Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	12.1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Badan POM	97,46	100,00	1,03	1,00	Efisien	0,03
		12.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	87,76	100,00	1,14	1,00	Efisien	0,14
		12.3	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	93,77	100,00	1,07	1,00	Efisien	0,07
		12.4	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	92,02	100,00	1,09	1,00	Efisien	0,09
		12.5	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	96,20	100,00	1,04	1,00	Efisien	0,04
		12.6	Pengelolaan SDM BPOM	77,39	100,00	1,29	1,00	Efisien	0,29
		12.7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	100,00	141,88	1,42	1,00	Efisien	0,42

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

SASARAN	KEGIATAN		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
	12.8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	73,90	117,32	1,59	1,00	Efisien	0,59

KERJA SAMA DALAM NEGERI BADAN POM YANG DIFASILITASI DAN DIKOORDINASI BIRO KERJA SAMA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	MOU/PKS	Penandat angan	Mitra	Nomor BPOM	Nomor Mitra	Tentang	Tahun	Tgl TTD	Berlaku (Tahun)	Fokus	Kategori	Pemerintah/Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	Kesepakatan Bersama	BPOM	Bhayangkari	HK.09.01.55.02.18.1291	B/20/II/2018/BUD	Peningkatan Peran Bhayangkari di Bidang Keamanan Obat dan Makanan	2018	28-Feb-18	3	Program Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) pada Masyarakat	Organisasi Masyarakat	Non Pemerintah
2	Nota Kesepahaman	BPOM	Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	HK.09.01.55.02.18.1290	I/MOI/Apeksi-BPOM/II/2018	Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan	2018	28-Feb-18	2	Pendampingan dan Pembinaan UMKM di Bidang Obat dan Makanan	Asosiasi	Non Pemerintah
3	Nota Kesepahaman	BPOM	Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APAKSI)	HK.09.01.55.02.18.1289	003/MOU/DP-APKASI/II/2018	Peningkatan Kerjasama Pengawasan di Bidang Obat dan Makanan	2018	28-Feb-18	3	Pendampingan dan Pembinaan UMKM di Bidang Obat dan Makanan	Asosiasi	Non Pemerintah
4	Nota Kesepahaman	BPOM	Badan Ekonomi Kreatif	-	-	Kerja Sama Peningkatan Keamanan Pangan dan Obat Tradisional dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif	2018	28-Feb-18	3	Pendampingan dan Pembinaan UMKM di Bidang Obat dan Makanan	K/L	Pemerintah

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

NO	MOU/PKS	Penandat angan	Mitra	Nomor BPOM	Nomor Mitra	Tentang	Tahun	Tgl TTD	Berlaku (Tahun)	Fokus	Kategori	Pemerintah/Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
5	Kesepakatan Bersama	BPOM	Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia	HK.09.1.22.02.18.1294	01/BPKN/NK/02/2018	Perlindungan Konsumen di Bidang Obat dan Makanan	2018	28-Feb-18	3	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	K/L	Pemerintah
6	Nota Kesepahaman	BPOM	Badan Siber dan Sandi Negara	HK.09.01.74.02.18.1286	PERJ.173/BSN/SU/KH.02.01/02/2018	Penyelenggaraan Pengamanan Siber dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Pengawasan Obat dan Makanan	2018	28-Feb-18	5	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	K/L	Pemerintah
7	Nota Kesepahaman	BPOM	Ombudsman Republik Indonesia	HK.09.01.1.6.02.18.1296	02/ORI-MOU/II/2018	Koordinasi Pencegahan Maladministrasi dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	2018	28-Feb-18	3	Perkuatan Kelembagaan	K/L	Pemerintah
8	Nota Kesepahaman	BPOM	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	HK.09.01.1.351.02.18.1298	04/II/NK/2018	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan di Satuan Pendidikan	2018	28-Feb-18	5	Peningkatan Kapasitas SDM	K/L	Pemerintah

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

NO	MOU/PKS	Penandat angan	Mitra	Nomor BPOM	Nomor Mitra	Tentang	Tahun	Tgl TTD	Berlaku (Tahun)	Fokus	Kategori	Pemerintah/Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
9	Nota Kesepahama n	Badan POM	Kementerian Perindustria n	HK.09.01.55.02. 18.1288	151/M- IND/2/2018	Peningkatan Keamanan dan Mutu Produk Pangan Olahan, Kosmetik, dan Obat Tradisional	2018	28-Feb-18	3	Pendampingan dan Pembinaan UMKM di Bidang Obat dan Makanan	K/L	Pemerintah
10	Kesepakatan Bersama	Balai POM di Kendari	Universitas Halu Oleo	HM.03.04.225.0 5.28.0846	2109/UN29/D N/2018	Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pengembangan dan Penelitian	2018	30-May-18	5	Peningkatan Kapasitas SDM	Akademisi	Non Pemerintah
11	Kesepakatan Bersama	Balai Besar POM di Mataram	Universitas Muhamadiya h Mataram	HK.09.01.107.0 5.18. 381	A/11.3.AU/0/V/ 2018	Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	2018	30-May-18	5	Peningkatan Kapasitas SDM	Akademisi	Non Pemerintah
12	Kesepakatan Bersama	Balai Besar POM di Mataram	Universitas Nadhlatul Wathan Mataram	HK.09.01.107.0 5.18. 079	PK/UNW.87/A. I/V/2018	Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	2018	30-May-18	5	Peningkatan Kapasitas SDM	Akademisi	Non Pemerintah
13	Kesepakatan Bersama	Balai Besar POM di Mataram	Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Prov. NTB	HK.08.1174.07. 18.1368	442 / 18 DIKES / VII / 2018 421.5/ 2190.SMK/ Dikbud	Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa dalam upaya Pembentukan	2018	10-Jul-18	5	Program Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) pada Masyarakat	OPD	Pemerintah

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

NO	MOU/PKS	Penandat angan	Mitra	Nomor BPOM	Nomor Mitra	Tentang	Tahun	Tgl TTD	Berlaku (Tahun)	Fokus	Kategori	Pemerintah/Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
						Konsumen Cerdas Obat dan Makanan di Prov. NTB						
14	Nota Kesepahama n	Balai Besars POM di Bandar Lampung	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	HK.09.01.100.0 7.18.1663	NK/B/U.01/20 18	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	2018	18-Jul-18	5	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemkab/P emkot	Pemerintah
15	Perjanjian Kerja Sama	Deputi Bidang pengawa san pangan olahan	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP	HK.09.01.5.23.0 7.82.2844	04/PDSPKP/K KP/PKS/VII/20 18	Peningkatan penerapan Sistem jaminan keamanan dan mutu produk perikanan pada usaha mikro, kecil dan menengah pengolahan ikan	2018	30/07/2018	5	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	K/L	Pemerintah
16	Perjanjian Kerja Sama	Badan POM	Palang Merah Indonesia	HK.09.01.2.23.0 8.18.4247	1151/PKS- PMI/VIII/2018	Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Mutu Produk Darah	2018	01/08/2018	2	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	K/L	Pemerintah

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

NO	MOU/PKS	Penandat angan	Mitra	Nomor BPOM	Nomor Mitra	Tentang	Tahun	Tgl TTD	Berlaku (Tahun)	Fokus	Kategori	Pemerintah/Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
17	Nota Kesepahaman	Balai Besar POM di Bandar Lampung	Pemerintah Kabupaten Way Kanan	HK.09.01.100.0 8.18.1986	12.p/I.04- WK/HK/2018	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	2018	27-Aug-18	5	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemkab/Pemkot	Pemerintah
18	Perjanjian Kerja Sama	Balai Besar POM di Palembang	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	HK.09.01.1.86.0 8.18.20	09/PKS- OTDA/1/2018	Pengawasan Pangan Olahan Secara Terpadu di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	2018	29-Aug-18	5	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemprov	Pemerintah
19	Perjanjian Kerja Sama	Balai POM di Ambon	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku	HK.09.119.08.1 8.2318 TAHUN 2018	001/PKS- MOU/2018	Pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka Dalam Peningkatan Keamanan Pangan di Provinsi Maluku	2018	01-Sep-18	5	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pramuka	Non Pemerintah
20	Kesepakatan Bersama	Badan POM	Pemerintahan Kabupaten Kediri	HK.09.01.1060. 09.18.8829	100/2327/418. 03/2018	Kerja Sama di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	2018	04-Sep-18	1	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemkab/Pemkot	Pemerintah
21	Kesepakatan Bersama	Badan POM	Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang	HK.09.01.1.86.0 8.18.21	HK.03.01/I.1/3 140/2018	kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	2018	05-Sep-18	5	Peningkatan Kapasitas SDM	Akademisi	Non Pemerintah
22	Perjanjian Kerja Sama	Balai Besar POM di Mataram	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Nusa	HK.08.1174.09. 18.1811	03-23-D	Pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka dalam Peningkatan Keamanan Pangan	2018	24/09/2018	5	Program Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	OPD	Pemerintah

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

NO	MOU/PKS	Penandat angan	Mitra	Nomor BPOM	Nomor Mitra	Tentang	Tahun	Tgl TTD	Berlaku (Tahun)	Fokus	Kategori	Pemerintah/Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
			Tenggara Barat			di Provinsi Nusa Tenggara Barat				pada Masyarakat		
23	Nota Kesepahaman	Badan POM	Institut Teknologi Bandung	HK.09.01.1.23.09.18.4627	052/I.1A/DN/2018	Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	2018	27-Sep-18	5	Peningkatan Kapasitas SDM	Akademisi	Non Pemerintah
24	Nota Kesepahaman	Badan POM	Tentara Nasional Indonesia	HK.03.1.23.09.18.4682	KERMA/34/IX/2018	Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan	2018	28-Sep-18	5	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	K/L	Pemerintah
25	Kesepakatan Bersama	Balai Besar POM di Manado	KPID Sulawesi Utara	HK.09.01.112.125.10.18.5520	019/80/JPID Sulut	Pengawasan Isi Siaran Terhadap Iklan, Publikasi dan Promosi Obat dan Makanan Pada Lembaga Penyiaran di Provinsi Sulawesi Utara	2018	10-Oct-18	3	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	OPD	Non Pemerintah
26	Perjanjian Kerja Sama	Badan POM	Persaudaraan Muslimah Kalimantan Barat	HK.09.01.107.10.18.3063	173/K/SEKRT-AT/PWPM/1440	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keamanan Pangan	2018	20-Oct-18	4	Program Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) pada Masyarakat	Organisasi Masyarakat	Non Pemerintah

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

NO	MOU/PKS	Penandat angan	Mitra	Nomor BPOM	Nomor Mitra	Tentang	Tahun	Tgl TTD	Berlaku (Tahun)	Fokus	Kategori	Pemerintah/Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
27	Perjanjian Kerja Sama	Badan POM	Ikatan Apoteker Indonesia Kalimantan Barat	HK.09.01.107.1 0.18.3064	009/SK/PD.IAI /Kalbar/x.2018	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan serta dukungan Ikatan Apoteker Indonesia Terhadap Program Badan Pengawas Obat dan Makanan	2018	21-Oct-18	5	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Asosiasi	Non Pemerintah
28	Perjanjian Kerja Sama	Balai POM di Bengkulu	Dinas Pariwisata Bengkulu	HK.04.01.99.10. 18.2561	556/1212/Disp ar/2018	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bengkulu	2018	22-Oct-18	3	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemprov	Pemerintah
29	Kesepakatan Bersama	Badan POM	Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu	HK.04.01.99.10. 18.2560	256011/MOU/ BADAN POM/2018	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	2018	22-Oct-18	1	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemprov	Pemerintah
30	Kesepakatan Bersama	Balai POM di Ambon	Pemerintah Kabupaten Buru Selatan	HK.09.01.119.1 1.18.2877	440/13/KBS/XI /2018	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	2018	01-Nov-18	5	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemkab/P emkot	Pemerintah
31	Nota Kesepakatan	Badan POM	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	HK.09.01.1.23.1 1.18.5317	22/KSP/XI/201 8	Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan	2018	02-Nov-18	5	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemprov	Pemerintah
32	Nota Kesepahaman	Balai POM di Medan	Stikes Aufa Royhan Padangsidim puan		467/SAR/E/XI/ 2018	Pemberdayaan dan Pengembangan mahasiswa Dalam Program pengawasan Obat dan Makanan	2018	12-Nov-18	5	Peningkatan Kapasitas SDM	Akademisi	Non Pemerintah

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

NO	MOU/PKS	Penandatangani	Mitra	Nomor BPOM	Nomor Mitra	Tentang	Tahun	Tgl TTD	Berlaku (Tahun)	Fokus	Kategori	Pemerintah/Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
33	Kesepakatan Bersama	Balai Besar POM di Pontianak	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat	HK.09.01.107.1 1.18.3319	071/KPID-KB/XI/2018	Pengawasan Isi Siaran Terhadap Publikasi, Promosi dan Iklan Obat dan Makanan	2018	13-Nov-18	5	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	OPD	Non Pemerintah
34	Nota Kesepahaman	Badan POM	Kemeterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	HK.09.1.23.11.1 8.5450	5/M/NK/2018	Percepatan Penelitian dan Pengembangan Obat dan Makanan di Indonesia	2018	19-Nov-18	5	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	K/L	Pemerintah
35	Kesepakatan Bersama	Badan POM	Pemerintah Provinsi Bali	HK.09.01.1.23.1 1.18.5551	075/34/KB/B.P EM.OTDA/XI/2 018	Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali	2018	27-Nov-18	1	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemprov	Pemerintah
36	Kesepakatan Bersama	Balai Besar POM di Denpasar	Pemerintah Kabupaten Buleleng	HK.09.01.116.1 1.18.4521	075/25/KB/201 8	Peningkatan Efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng	2018	27-Nov-18	1	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemkab/P emkot	Pemerintah
37	Kesepakatan Bersama	Balai Besar POM di Denpasar	Pemerintah Kota Denpasar	HK.09.01.116.1 1.18.4523	415.4/28/KB/B KS/2018	Peningkatan Efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Kota Denpasar	2018	27-Nov-18	1	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemkab/P emkot	Pemerintah

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

NO	MOU/PKS	Penandat angan	Mitra	Nomor BPOM	Nomor Mitra	Tentang	Tahun	Tgl TTD	Berlaku (Tahun)	Fokus	Kategori	Pemerintah/Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
38	Kesepakatan Bersama	Balai Besar POM di Denpasar	Pemerintah Kabupaten Gianyar	HK.09.01.116.1 1.18.4517	043/27/KSB/B K.Tapem/XI/2 018	Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Gianyar	2018	27-Nov-18	1	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemkab/P emkot	Pemerintah
39	Kesepakatan Bersama	Balai Besar POM di Denpasar	Pemerintah Kabupaten Klungkung	HK.09.01.116.1 1.18.4509	075/34/KSB/P em	Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Klungkung	2018	27-Nov-18	5	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemkab/P emkot	Pemerintah
40	Kesepakatan Bersama	Badan POM	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	HK.09.01.1.23.1 1.18.5554	188/371/429.0 12/2018	Kerjasama Di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	2018	30-Nov-18	5	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemkab/P emkot	Pemerintah
41	Kesepakatan Bersama	Badan POM	Institut Teknologi Sumatera	HK.09.01.100.1 2.18.3982	027/IT9.A/Mo U- ITERA/XII/201 8	Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	2018	05-Dec-18	5	Peningkatan Kapasitas SDM	Akademisi	Non Pemerintah
42	Kesepakatan Bersama	Badan POM	Universitas Mitra Indonesia	HK.09.01.100.1 2.18.3984	K10/AU/131/S K/UMITRA/20 18	Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	2018	05-Dec-18	5	Peningkatan Kapasitas SDM	Pemkab/P emkot	Pemerintah
43	Kesepakatan Bersama	Badan POM	Universitas Lampung	HK.09.01.100.1 2.18.3981	6497/UN26/K S/2018	Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	2018	05-Dec-18	5	Peningkatan Kapasitas SDM	Pemkab/P emkot	Pemerintah

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

NO	MOU/PKS	Penandat angan	Mitra	Nomor BPOM	Nomor Mitra	Tentang	Tahun	Tgl TTD	Berlaku (Tahun)	Fokus	Kategori	Pemerintah/Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
44	Kesepakatan Bersama	Badan POM	Universitas Tulang Bawang Lampung	HK.09.01.100.1 2.18.3983	119/R/AA/UTB /XI/18	Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	2018	05-Dec-18	5	Peningkatan Kapasitas SDM	Pemkab/P emkot	Pemerintah
45	Kesepakatan Bersama	Badan POM	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	HK.09.01.1.23.1 1.18.5464	100/27/II/2018	Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Konsumen Melalui Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	2018	06-Dec-18	1	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemkab/P emkot	Pemerintah
46	Kesepakatan Bersama	Balai Besar POM di Medan	Institut Kesehatan Deli Husada	HK.09.01.92.12. 18.6295	4808/RIKT.IK DH/2018	Pemberdayaan dan Pengembangan mahasiswa Dalam Program pengawasan Obat dan Makanan	2018	27-Dec-18	5	Peningkatan Kapasitas SDM	Akademisi	Non Pemerintah
47	Kesepakatan Bersama	Balai Besar POM di Medan	Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam	HK.09.01.92.12. 18.6296	201.A/INKES- MLP/XII/2018	Pemberdayaan dan Pengembangan mahasiswa Dalam Program pengawasan Obat dan Makanan	2018	27-Dec-18	5	Peningkatan Kapasitas SDM	Akademisi	Non Pemerintah
48	Kesepakatan Bersama	Balai Besar POM di Medan	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	HK.09.01.92.12. 18.62960	440/6981/201 8	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	2018	27-Dec-18	1	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemkab/P emkot	Pemerintah

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

NO	MOU/PKS	Penandat angan	Mitra	Nomor BPOM	Nomor Mitra	Tentang	Tahun	Tgl TTD	Berlaku (Tahun)	Fokus	Kategori	Pemerintah/Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
49	Kesepakatan Bersama	Balai Besar POM di Medan	Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	HK.09.01.92.12.18.6292	100/59/pem-ks/2018	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	2018	27-Dec-18	1	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemkab/Pemkot	Pemerintah
50	Kesepakatan Bersama	Badan POM	Universitas Sumatera Utara	HK.09.01.1.23.12.18.5785	14903/UN5.1.R/KPM/2018	Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	2018	27-Dec-18	5	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemkab/Pemkot	Pemerintah
51	Perjanjian Kerja Sama	Balai Besar POM di Pontianak	Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat	HK.09.01.107.12.18.3735	PKS/1220/XII/Ka/Cm.00,01/2018/BNNP-KB	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika	2018	27-Dec-18	5	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	OPD	Non Pemerintah
52	Kesepakatan Bersama	Balai Besar POM di Medan	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	HK.09.01.92.12.18.6297	180/16/HK-MoU/2018	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	2018	27-Dec-18	1	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemkab/Pemkot	Pemerintah
53	Kesepakatan Bersama	Balai Besar POM di Medan	Pemerintah Kota Tanjung Balai	HK.09.01.92.12.18.6297	180/16/HK-MoU/2018	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	2018	27-Dec-18	1	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemkab/Pemkot	Pemerintah
54	Kesepakatan Bersama	Balai Besar POM di Medan	Universitas Sari Mutiara Indonesia	HK.09.01.92.12.18.6297	180/16/HK-MoU/2018	Pemberdayaan dan Pengembangan mahasiswa Dalam Program pengawasan Obat dan Makanan	2018	27-Dec-18	1	Peningkatan Kapasitas SDM	Akademisi	Non Pemerintah

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2018

NO	MOU/PKS	Penandat angan	Mitra	Nomor BPOM	Nomor Mitra	Tentang	Tahun	Tgl TTD	Berlaku (Tahun)	Fokus	Kategori	Pemerintah/Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
55	Kesepakatan Bersama	Balai Besar POM di Medan	Pemerintah Kabupaten Karo	HK.09.01.92.12.18.6297	180/16/HK-MoU/2018	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	2018	27-Dec-18	1	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemkab/Pemkot	Pemerintah
56	Kesepakatan Bersama	Badan POM	Pemerintah Kabupaten Samosir	13-HK.09.01.92.07.18.3351 Tahun 2018	12 Tahun 2018	Kerjasama Di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	2018	27-Jul-18	5	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemkab/Pemkot	Pemerintah
57	Nota Kesepahaman	Badan POM	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	HK.09.01.1.72.05.18.2895	MoU-8/K/D2/2018	Penguatan Tata Kelola KePemerintahan yang Baik di lingkungan Badan pengawas Obat dan makanan	2018	09-May-18	5	Perkuatan Kelembagaan	K/L	Pemerintah



**Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560**



021 4244691



halobpom@pom.go.id



www.pom.go.id



@bpom_ri



Bpom RI